

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis kehadiran Allah SWT atas terbitnya buku **Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang** ini. Buku ini dibuat atas keprihatinan tidak terpenuhinya hak restitusi yang seharusnya diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pemberian hak restitusi kepada korban, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dirasakan belum maksimal.

Semoga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan akademisi serta dapat menjadi pelengkap referensi untuk melindungi korban tindak pidana perdagangan orang.

Jakarta, Mei 2021

Penulis

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
A. Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang	3
B. Hak-hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	6
C. Persoalan Hak Asasi dan Faktor Kontribusi Terjadinya Perdagangan Orang	9
<b>BAB II INSTRUMEN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	<b>24</b>
<b>BAB III PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA</b>	<b>61</b>
<b>BAB V PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	<b>70</b>
<b>BAB VI UPAYA PAKSA, PENYITAN DAN EKSEKUSI DALAM PEMIDANAAN</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>100</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	<b>103</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Fenomena perdagangan orang sebagian besar berbasis ekonomi, dimulai dari keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku baik individu maupun korporasi. Pelaku perdagangan orang mencari keuntungan dari para korban maupun keluarganya. Bisnis perdagangan orang meraup keuntungan besar dikarenakan pelaku melakukan pungutan materi serta tenaga kerja yang dibayarkan secara murah kepada korban. Hak asasi paling mendasar dari seseorang adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan kebebasan. Hak asasi tersebut tidak dimiliki korban perdagangan orang. Korban perdagangan sering kali dipaksa masuk ke dalam kondisi kerja yang kejam dan tidak manusiawi dan tidak berdaya untuk meninggalkan situasi eksploitatif mereka atau mencari bantuan.

Kejahatan perdagangan orang disebut secara eksplisit dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 297 KUHP menyebutkan “perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 297 KUHP berisi ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan pelacuran, dalam perdagangan orang seringkali terjadi eksploitasi dengan tujuan pelacuran.

Untuk melindungi korban perdagangan orang, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2009. Diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia telah menjadi bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang secara global.

Sementara pada butir c bagian pertimbangan Undang-Undang PTPPO menyebutkan tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia, sehingga harus segera diberantas..

#### 1. Perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana khusus

Pengaturan tindak pidana khusus merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang pengaturan tidak dimuat dalam KUHP. Pengaturan tersebut tentu masih dalam toleransi yang diperkenankan dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materil.

Bisnis perdagangan orang berkembang pesat terutama di abad ke 21 karena didukung dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Perdagangan orang yang semula dilakukan secara konvensional kini beralih menjadi tindak pidana canggih melalui media internet. Penggunaan media internet oleh masyarakat dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk eksis dan mempresentasikan dirinya. Media internet berupa media sosial adalah wadah untuk mencari pertemanan seperti Facebook, Twitter, aplikasi pencarian jodoh, instagram, dll.

Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya menjadi ancaman meluasnya model perdagangan orang. Melalui aplikasi media sosial, dunia menjadi tanpa batas karena korban direkrut tanpa sadar dengan janji mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, dibujuk dengan rayuan untuk dinikahi, bahkan tidak tertutup kemungkinan dilakukan dengan ancaman. Kejahatan perdagangan orang ini pada akhirnya berkembang secara terorganisir dan menjadi kriminalitas transnasional.

Mayoritas perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang. Mereka diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dibeli, dijual, dikirim ke wilayah lain dan kemudian dijual kembali. Korban perdagangan orang biasanya dijual untuk dijadikan pekerja seks komersial dan buruh anak dengan bayaran yang rendah. Isu lainnya dari tindak pidana perdagangan orang juga tidak hanya sekedar terjadinya migrasi orang ke antar pulau ataupun antar Negara. Isu penting yang harus menjadi perhatian adalah korban kejahatan perdagangan orang kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum, bahkan terjadi pengabaian atas hak yang harus diterimanya.

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dapat diberikan melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan integrasi.<sup>1</sup> Hal ini juga ditegaskan melalui Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa “setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Dalam prakteknya pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, 1992, hlm. 78

masih mengalami berbagai macam hambatan. Rosnawati<sup>2</sup> menyebutkan bahwa hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan a) Aparat penegak hukum kurang berinisiatif dan membutuhkan realisasi hak korban berupa hak restitusi material dan material pada setiap tahapan penanganan kasus perdagangan orang, b) belum adanya regulasi implementasi yang jelas dan tegas dalam proses pelaksanaan mekanisme restitusi dalam UU PTPPO, c) Korban dan keluarga tidak sadar hukum dan tidak berpartisipasi untuk memperjuangkan hak restitusinya sehingga aparat penegak hukum tidak dapat membantu. Jika hak materiel saja sulit untuk dipenuhi, maka dapat dipastikan hak immateriel korban pun tidak akan dapat diberikan.

Tidak hanya pemenuhan hak restitusi, korban juga harus dipenuhi hak immaterielnya. Korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan yang sangat kompleks, secara psikis dan fisik.

## **B. Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam sistem hukum nasional korban kejahatan seringkali belum mendapatkan penanganan serius. Pemberian hak korban kejahatan masih minim diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan.. Hakikatnya korban dari suatu tindak pidana merupakan pihak yang sangat dirugikan, mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena trauma yang dimilikinya akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Korban seringkali tidak mendapat perlindungan seperti yang

---

<sup>2</sup> Rosnawati, Mohd. Din, dan Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 4, No 1 Februari 2016, hlm.1-7

diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Hal ini tentu mengakibatkan saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana, kondisi korban masih terabaikan karena tidak terpenuhi hak-haknya.

Masalah ppidanaan dalam hukum pidana terkait dengan perbuatan pidana seseorang. Jika seorang melakukan suatu perbuatan pidana akan dikenakan sanksi. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.”<sup>3</sup> Sanksi pidana tersebut akan mencabut hak-hak seseorang untuk menikmati kemerdekaan termasuk pencabutan hak-hak dasar seseorang.

Penjatuhan pidana terhadap seorang tersangka merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi pidana merupakan ancaman hukuman berupa penderitaan dan siksaan. Penerapan sanksi pidana bagi seorang pelaku kejahatan secara tegas tentu diharapkan dapat memberikan memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat menghindari suatu perbuatan jahat. Hal yang harus diingat dari penjatuhan pidana tersebut adalah bahwa hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan melindungi kehidupan masyarakat secara aman dan tertib. Atas dasar hal tersebut maka setiap manusia harus memiliki rambu-rambu dan batasan-batasan untuk tidak mengganggu dan melanggar kepentingan orang lain. Namun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah dapat dihindari adanya suatu kejahatan.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulang terjadinya kejahatan dalam masyarakat dianggap sebagai suatu hal biasa dalam memberantas suatu kejahatan.

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9.

Penggunaan hukum pidana dalam memberantas suatu kejahatan tentu harus dipikirkan tentang tujuan yang ingin dicapai, memilih cara dan sarana yang tepat untuk mengembalikan kondisi masyarakat pada kondisi sebelum terjadinya suatu kejahatan.

Seseorang yang menjadi korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, seringkali mengalami trauma dan menderita penyakit yang membahayakan. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan tersebut membutuhkan suatu kebijakan dan peraturan hukum yang dapat memberikan keadilan, memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum.

Mardjono Reksodiputro menyebutkan pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) harus menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.<sup>4</sup> Sementara menurut Purwoto S. Gandasubrata, “Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).”<sup>5</sup>

Pemberian hak restitusi kepada korban kejahatan menurut Romli Atmasasmita, merupakan perwujudan resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Cetakan Pertama (Edisi Pertama), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 77

<sup>5</sup>Purwoto S. Gandasubrata, “Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana,” *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung, 1997. hlm. 117-118



warga masyarakat. Proses resosialisasi diharapkan menjadi bentuk tanggungjawab sosial dari si pelaku.<sup>6</sup>

Mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana merupakan akibat dari adanya pelanggaran untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga pada akhirnya pelaku pelanggaran tersebut harus bertanggung jawab.

Terdapat dua pandangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simon tentang pandangan monistis bahwa “*strafbaarfeit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan seseorang yang bersalah dan dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).<sup>7</sup> Aliran monism menyebutkan bahwa unsur *strafbaarfeit* terdiri atas unsur perbuatan (unsur objektif) maupun unsur pembuat yang lazim (unsur subjektif). Dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuat tersebut menyebabkan *strafbaarfeit* sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Jika terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

### **C. Persoalan Hak Asasi dan Faktor Kontribusi Terjadinya Perdagangan Orang**

Hak dasar yang dimiliki setiap manusia terdiri atas hak manusia yang dimiliki sejak seseorang dilahirkan dan hak undang-undang yaitu hak yang diberikan secara khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap pribadi

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992. hlm. 44-45

<sup>7</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 61

manusia. Hak manusia sangat berhubungan dengan eksistensi kehidupan seorang manusia, tidak dapat dicabut dan tidak bergantung kepada orang lain.

Hak asasi manusia menurut Soedjono Dirdjosisworo merupakan hak yang ada pada diri manusia yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>8</sup>

Hak asasi manusia adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada nilai-nilai martabat manusia, dan wajib dijunjung tinggi oleh bangsa dan negara Indonesia yang berfasalfah Pancasila. Hak asasi manusia merupakan hak fundamental terdiri atas hak atas persamaan dan hak atas kebebasan. Hak dasar ini melahirkan hak asasi lainnya.

Pengaturan hak asasi manusia lainnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mencakup beberapa tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan hukum perdata/hak sipil, hak politik, hak sosial, hak budaya serta hak ekonomi. Namun demikian, dalam realitas kehidupan bermasyarakat masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia bisa saja dilanggar oleh seseorang, sekelompok orang, maupun aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja. Terjadinya perbuatan melawan hukum berupa kelalaian, pembatasan hak, pencabutan hak asasi seseorang yang sudah dilindungi undang-undang. Kejahatan yang terjadi pada manusia merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai suatu serangan terhadap diri orang lain dalam bentuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.33

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, penganiayaan terhadap kelompok tertentu berdasarkan perbedaan suku, ras maupun agama, penghilangan orang secara paksa ataupun kejahatan *apertheid*.

Perbudakan berasal dari kata “Budak” adalah suatu keadaan berupa mengabdikan, taat, merendahkan diri. Budak yang dibeli, dimiliki, dianggap sebagai milik tuannya sehingga harus taat serta tunduk saat menjalankan tugas serta tanggung jawab apapun yang dibebankan padanya.<sup>9</sup>

Perbudakan merupakan suatu tindakan untuk menguasai orang lain, sehingga orang tersebut merasa takut, merasa bergantung ataupun berhutang budi, tidak berani berbuat apa-apa hingga akhirnya diperdagangkan sebagai budak. Larangan tentang praktek perbudakan, praktek perdagangan budak, perdagangan perempuan dan anak ditegaskan dalam Pasal 20 UU HAM serta Pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi secara seksual, penculikan, perdagangan anak dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang.

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di masyarakat pada akhirnya dibuat aturan lain dalam bentuk tindak pidana khusus diatur melalui undang-undang yang berada di luar KUHP. Undang-undang hukum pidana khusus tersebut hadir sebagai pelengkap dari hukum pidana yang sudah terkodifikasi. Andi Hamzah menyebutkan bahwa aturan hukum pidana di luar KUHP dapat

---

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Dinamika Masa Kini*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.163

disebut sebagai undang-undang (pidana) tersendiri atau hukum pidana di luar kodifikasi atau non kodifikasi.<sup>10</sup> KUHP sendiri memungkinkan hadirnya undang-undang pidana di luar KUHP sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan; ketentuan umum KUHP, kecuali bab IX (interpretasi istilah) berlaku terhadap perbuatan yang berdasarkan undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Memori penjelasan (*Memori van Toelichting/MvT*), dijelaskan bahwa dalam Pasal 103 KUHP istilah pidana khusus diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Penerapan ketentuan hukum pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu ketentuan khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang umum.

Tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristi khusus dan bersifat *extra ordinary crime*. Banyak aspek yang terlibat dan sangat kompleks serta bersifat *transnational organized crime*, melintasi batas-batas negara dan dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi kepentingan korban perdagangan orang.

Dalam UU No.21 tahun 2007 memberikan harapan dan tantangan bagi para aparaturnya hukum. Para pemerhati hukum harus terus berupaya untuk

---

<sup>10</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.8

memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.

UU PTPPO dibentuk sebagai perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 (Protokol Palermo) Tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak. Dalam UU PTPPO, ditemukan unsur dan norma hukum baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-Undang PTPPO merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pada nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk pencegahan sejak awal, penindakan kepada pelaku, melindungi korban serta meningkatkan kerjasama dalam penghapusan tindak pidana perdagangan orang.

Arah kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan saksi dan korban terkait pada: a. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang; b. Memberikan perlindungan atas keselamatan korban tindak pidana; c. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Migrasi sebagai akibat terjadinya perdagangan orang

*The term “migrant” usually denotes a person who crosses international borders due to various reasons, in legal (legal migrants) or illegal (illegal migrants) manner. Migrants are persons involved in global migration process i.e. different modalities of temporary or permanent movement of individuals or groups in space. Migrations can be, due to various criteria, internal and external, forces of voluntary, labour, legal and illegal.<sup>11</sup>*

(Terminologi “migran” biasanya menunjukkan seseorang yang melewati batasan internasional karena beberapa alasan, dalam cara yang sah (migran yang sah) atau tidak sah (migran yang tidak sah). Migran adalah orang-orang yang termasuk dalam proses migrasi global contohnya modalitas berbeda dari

---

<sup>11</sup> Jelena Stojić Dabetić, Predrag Mirković, “Migrant Work Relations – Pursuing Balance Of Interests”, *Journal Of Eastern-European Criminal Law*, 1. hlm. 104, (2016)

pergerakan sementara atau permanen dari individual atau kelompok dalam ruang. Migrasi dapat terjadi karena beberapa kriteria, internal dan eksternal, kekuatan sukarela, tenaga kerja, sah dan tidak sah).

Globalisasi dan perkembangan ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya migrasi. Masyarakat yang ingin merubah kehidupannya berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya melewati batas Negara maupun batas administrasi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan menetap di suatu wilayah. Migrasi terjadi tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Migrasi dapat terjadi dikarenakan alasan politik, alasan sosial, alasan agama, kepadatan penduduk, keadaan geografis, dan berbagai alasan lainnya. Kesejahteraan hidup merupakan tujuan utama dari masyarakat yang melakukan migrasi.

Fenomena aktual terkait migrasi internasional merupakan bagian dalam sejarah peradaban manusia. Volume migrasi dalam masyarakat modern telah terglobalisasi, menjadi penanda terbukanya isolasi-isolasi sosial budaya, ekonomi maupun politik global. Hal ini mengakibatkan terjadinya proses peleburan batas identitas sosial budaya dan politik ke dalam sistem *union system* atau *paralaysation*.<sup>12</sup>

Terdapat dua kategori hukum akibat dari fenomena migrasi tersebut yaitu secara legal dan secara ilegal. Migrasi dilakukan dengan cara yang legal tentu akan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman di wilayah yang ditujunya. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang memilih cara ilegal untuk dapat

---

<sup>12</sup> Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 94

bermigrasi ke wilayah lain dikarenakan cara legal sangatlah rumit karena berbagai prosedur yang harus ditempuh dan biaya yang mahal. Akibatnya tanpa disadari masyarakat yang akan bermigrasi tersebut terjebak dalam mafia pekerja yang mencari keuntungan sangat besar. Mafia ini akan mengarahkan para migran ke dunia kerja ilegal, sehingga yang terjadi adalah korban diperdagangkan sebagai budak, bekerja secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki dokumentasi legal, menjadi pekerja seks komersial, bahkan akan ditemui pekerja anak dengan resiko yang sangat tinggi.

Perdagangan orang merupakan kegiatan ekonomi informal non kontraktual, seperti contohnya pekerja seks komersial, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dll. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan para migran secara pendidikan, ketrampilan, faktor sosial ekonomi dan lain sebagainya sehingga tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Perdagangan orang dilihat dari konteks perpindahan dan migrasi merupakan fenomena global yang tidak memandang usia dan jenis kelamin, perempuan, laki-laki, maupun anak-anak seringkali menjadi korban dari terjadinya proses migrasi tersebut. Namun demikian, dalam prakteknya dilapangan, perempuan seringkali menjadi korban akibat terjadinya migrasi. Perempuan seringkali berpindah dan dipindahkan tanpa persetujuan mereka untuk berbagai alasan. Perempuan dan anak yang bermigrasi seringkali berada dalam posisi rentan, karena dalam proses bermigrasi seringkali mengalami kekerasan, mengalami kerja paksa dan tidak sedikit yang mengalami penyiksaan hukuman yang semena-mena terhadap dirinya.

Akar penyebab migrasi dan perdagangan orang terlihat dari ketiadaan hak-hak yang seharusnya menjadi milik setiap orang, yaitu hak atas kebebasan bergerak, hak untuk mencari nafkah secara nyaman, hak atas kebebasan untuk berkomunikasi, hak atas informasi pekerjaan dan gaji yang akan diterimanya dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa perdagangan orang akibat dari adanya migrasi telah melanggar hak asasi manusia karena kelompok yang lebih kuat dalam hal ini mafia pekerja telah merampas kebebasan seseorang.

Menurut Abdul Haris,<sup>13</sup> faktor penentu terjadinya volume migrasi internal dan internasional diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor politik, terkait birokrasi serta prosedur dalam proses bermigrasi. Kemudahan sistem birokrasi, prosedur yang sederhana mengakibatkan meningkatkan volume migrasi. Jika ingin menurunkan volume migrasi maka birokrasi dan prosedurnya harus diperketat.
- b. Faktor ekonomi, terdiri atas latar belakang perekonomian migran, biaya migrasi serta upah yang akan diterima
- c. Faktor aksesabilitas transportasi maupun jarak migrasi. Biaya transportasi yang terjangkau dan tersedianya alat transportasi yang menghubungkan antara daerah asal migran dengan tujuan migran akan meningkatkan volume migrasi.

Tersedianya pasar tenaga kerja ilegal merupakan lahan subur terjadinya perdagangan orang. Para migran seringkali terjerat oleh mafia pencari kerja yang

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm.90-91



mengendalikan pasar ilegal tersebut tidak berdaya dan tidak mampu keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan tersebut.

### 3. Ketentuan Pidana untuk menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat ditujukan untuk memberikan perasaan tenang, tidak merasakakan khawatir akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Hukum pidana dalam arti subjektif merupakan hak negara menjatuhkan hukuman atas dasar hukum pidana dalam arti objektif, yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan oleh perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.<sup>14</sup>

Dalam KUHP telah ditetapkan beberapa pasal berkaitan dengan perdagangan orang. Pasal-pasal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

#### a) Buku II, Bab XIV : Kejahatan terhadap kesusilaan

Pasal 297 KUHP; memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Definisi kejahatan perdagangan orang didalam ketentuan pasal 297 KUHP sangat luas. Setiap perbuatan membawa (menyerahkan) seorang perempuan atau anak-anak ke dalam situasi pelacuran dan setiap perbuatan untuk mencegah seorang perempuan dan anak-anak untuk berhenti dari praktik pelacuran masuk dalam rumusan delik pasal 297 KUHP.

Secara umum definisi kejahatan perdagangan orang didalam ketentuan pasal 297 KUHP sangat luas. Setiap perbuatan membawa (menyerahkan) seorang

---

<sup>14</sup> Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2006, hlm.1.

perempuan atau anak-anak ke dalam situasi pelacuran dan setiap perbuatan untuk mencegah seorang perempuan dan anak-anak untuk berhenti dari praktik pelacuran masuk dalam rumusan delik pasal 297 KUHP.

Unsur khusus dari pasal ini adalah tentang yurisprudensi yang ada menunjukkan bahwa perdagangan orang dapat dipahami sebagai :

- 1) Setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau menyerahkan seorang perempuan (termasuk perempuan belum dewasa) atau seorang laki-laki belum dewasa ke dalam praktik pelacuran,
- 2) Atau setiap perbuatan dengan tujuan mencegah seseorang yang secara sukarela bekerja di bidang pelacuran untuk berhenti bekerja melacurkan diri.

Sedangkan unsur-unsur khusus lainnya adalah:

- 1) Perempuan dewasa maupun laki-laki dan perempuan belum dewasa dapat menjadi korban perdagangan orang
- 2) Menyerahkan, membawa, mencegah, mengimplikasikan *dolus* dalam segala bentuknya termasuk *dolus eventualis*.

Sementara unsur umum belum dewasa sejak berlakunya UU Perlindungan Anak. Seseorang dianggap belum dewasa apabila belum genap berumur 18 tahun; keadaan menikah atau pernah menikah tidak mengubah status belum dewasa. UU Perlindungan anak mengenyampingkan semua peraturan perundang-undangan lain berkenaan dengan status belum dewasa, termasuk UU Perkawinan No. 1/1974.

Sanksi pidana maksimum untuk perdagangan orang menurut pasal 297 KUHP adalah enam tahun penjara. Pidana tambahan pasal 298 ayat 1 menetapkan bahwa jika dijatuhkan putusan bersalah dilakukannya tindak pidana perdagangan orang (pasal 297 KUHP) maka Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa hak-hak tersebut dalam Pasal 35 ayat (1-5) dapat dijatuhkan. Hak-hak yang dicabut adalah hak untuk mendapat segala jabatan tertentu, hak

untuk masuk pada kekuasaan/angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dari suatu pemilihan umum; hak menjadi penasehat hukum atau penguasa, kurator atau kurator pengawas pada orang lain, bukan anaknya sendiri, kuasa bapak, kuasa wali dan penjara atas anaknya sendiri; hak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.

b. Bab XII : Memalsukan surat-surat

Pasal 263 KUHP

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau suatu pembebasan hutang, atau yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun penjara.
- 2) Dengan hukuman serupa itu, juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Secara umum, ayat pertama mengkriminalisasikan orang secara sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat untuk digunakan seakan-akan surat tersebut adalah asli. Ayat kedua mengkriminalisasikan orang secara sengaja menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan.

Unsur khusus dari pasal ini adalah:

Ayat 1 :

Membuat surat palsu atau memalsukan mencakup *dolus eventualis* (kesengajaan). Perbuatan memalsukan tersebut harus dilakukan dengan maksud menggunakannya atau digunakan oleh orang lain seolah-olah asli (tidak

dipalsukan), tidaklah perlu bahwa dokumen tersebut benar telah digunakan. Jika penggunaannya dapat menyebabkan atau mendatangkan kerugian, hal penting untuk dibuktikan adalah bahwa kerugian dapat atau mungkin dapat terjadi; tidaklah perlu bahwa betul-betul kerugian tersebut muncul akibat dari maksud tujuan penggunaan dokumen tersebut.

#### Ayat 2

Jika penggunaannya dapat menyebabkan atau mendatangkan kerugian; penting untuk dibuktikan bahwa kerugian dapat atau mungkin muncul; tidaklah perlu bahwa benar kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari maksud-tujuan penggunaan dokumen tersebut. Sanksi pidana dari pasal ini adalah pidana maksimum untuk kedua kejahatan tersebut adalah selama-lamanya enam tahun penjara.

Pidana tambahan : Pasal 276 KUHP menetapkan bahwa dalam hal penjatuhan pidana atas salah satu dari tindakan pidana ini, dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mendapatkan segala jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk masuk pada kekuasaan/angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum; hak menjadi penasehat hukum atau penguasa, kurator atau kurator pengawas pada orang lain, bukan anaknya sendiri, kuasa bapak, kuasa wali dan penjara atas anaknya sendiri; hak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. (Pasal 35 ayat 1-4)

Pasal 264 memperberat pidana maksimum yang dapat dijatuhkan menjadi delapan tahun penjara, yakni jika berkenaan dengan adanya tambahan kualifikasi perbuatan pemalsuan tersebut.

c. Bab XVIII; kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang

Pasal 324 KUHP

Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur baik langsung maupun tidak langsung dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara.

Sanksi pidana dari pasal ini dilengkapi dengan pidana tambahan pada pasal 337 KUHP yang menetapkan bahwa penjatuhan hukuman atas salah satu dari kejahatan ini, maka dapat digunakan pidana tambahan berupa pencabutan hak pencabutan hak untuk mendapatkan segala jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk masuk pada kekuasaan/angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum; hak menjadi penasehat hukum atau penguasa, kurator atau kurator pengawas pada orang lain, bukan anaknya sendiri, kuasa bapak, kuasa wali dan penjara atas anaknya sendiri; hak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. (Pasal 35 ayat 1-4)

d. Beberapa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang lainnya yaitu:

1) UU Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 43:

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 44:

Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

Pasal 45:

Pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor Kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Pasal 46:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten kota.

Pasal 47:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten kota dalam hal saksi dan atau organ mendapatkan ancaman. POLRI wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

## 2) UU PTPPO

Pasal 48:

Korban tindak pidana perdagangan orang serta ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi, terdiri atas kerugian dan kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, perawatan medis psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Pasal 49:

Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan di papan pengumuman.

Pasal 50:

Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. korban dan /atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan dan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 51:

Korban yang mengalami trauma maupun penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan Hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan Korban ke Indonesia atas biaya Negara.

#### Pasal 52

Korban yang mengalami trauma maupun penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang dan membutuhkan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

## BAB II

### INSTRUMEN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA

#### PERDAGANGAN ORANG

Penghapusan praktek perdagangan orang telah dilakukan berulang kali oleh masyarakat internasional sejak tahun 1904. Pertama sekali dengan dikeluarkannya *International Agreement the Supression of White Slave Traffic*.<sup>15</sup> Dalam prakteknya perjanjian ini tidak begitu efektif,<sup>16</sup> hingga akhirnya di tahun 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*.<sup>17</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatangani *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children* pada tahun 1921<sup>18</sup> dilanjutkan dengan *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age* di tahun 1933.<sup>19</sup> Keempat konvensi ini kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam *Convention for the Supression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat persetujuan internasional tanggal 4 Mei 1944 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih. Dokumen ini diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948.

<sup>16</sup> Gerakan anti perdagangan manusia saat itu lebih didorong karena adanya ancaman terhadap kemurnian populasi perempuan kulit putih. Perjanjian ini juga lebih banyak memfokuskan perhatian kepada perlindungan korban daripada menghukum pelaku.

<sup>17</sup> Lihat konvensi internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948. Untuk terjemahan Bahasa Indonesia. Lihat Perisai Perempuan. LBH Apik Jakarta, 1999.

<sup>18</sup> Lihat konvensi internasional tanggal 30 September 1921 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

<sup>19</sup> Lihat konvensi internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

<sup>20</sup> Lihat Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur. Konvensi ini dirumuskan oleh Komite Ketiga (Sosial Budaya dan Kemanusiaan) dari PBB dan memasukan



Perdagangan orang secara internasional telah dilarang melalui berbagai instrument. berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang seperti yang telah disebutkan diatas. Rincian instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Periode Sebelum Tahun 1945

##### a. *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*, 1904

Instrument ini muncul dikarenakan adanya kecemasan dan ketakutan Negara Eropa pada saat itu, karena perempuan kulit putih eropa dijadikan obyek perdagangan orang yang dipekerjakan di rumah-rumah pelacuran. Perjanjian internasional ini fokus pada upaya penghapusan perdagangan budak putih dan menekan lajunya penjualan perempuan kulit putih eropa untuk dijadikan sebagai obyek pelacuran.

Perjanjian internasional ini diikuti 13 negara di Eropa. Kesepakatan dari perjanjian ini adalah kerjasama antar Negara peserta dan upaya memberikan perlindungan kepada korban.

---

beberapa dari modifikasi berdasarkan pada masukan terhadap pertanyaan-peranyaan yang diajukan kepada komite keenam (hukum). Majelis umum membahas konvensi ini dalam Sidang Umum dan menyetujuinya dalam Resolusi 317 (IV) tertanggal 1949 dengan suara 35 berbanding 2 dan 15 abstain. Konvensi ini mencerminkan pandangan yang pada masa itu dominan di dalam komite ketiga, bahwa pelacur adalah korban dan karena itu hukuman harus dijatuhkan kepada \* yang menjerumuskan mereka. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang bahkan korban jika menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur. Konveksi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapapun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat untuk melacurkan, orang-orang lain.

b. *International Convention for the Suppression of the white traffic*, 1910

Perjanjian ini dibuat sebagai amandemen dari *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic* tahun 1904. Sebanyak 13 negara peserta menyepakati bahwa mucikari yang secara paksa mempekerjakan perempuan-perempuan kulit putih menjadi pelacur di rumah-rumah pelacuran akan dikenakan sanksi pidana.

c. *International Convention for the Suppression of the traffic in Woman and Children*, 1921

Perjanjian ini merupakan usaha untuk menghapus segala bentuk perdagangan orang. Perjanjian ini memperluas korban perdagangan orang termasuk anak-anak didalamnya. Hal tersebut dikarenakan banyak anak-anak yang dijadikan sebagai obyek perdagangan orang, seperti dipaksa bekerja yang membahayakan keselamatan anak, eksploitasi seksual, dan dijadikan sebagai obyek perdagangan orang dalam kondisi perang.<sup>21</sup>

Perubahan yang signifikan dari perjanjian internasional ini adalah pemikiran memperluas perlindungan terhadap korban perdagangan orang tidak hanya meliputi perempuan kulit putih dan anak, tetapi juga ditujukan untuk perempuan non kulit putih.

Subtansi dari perjanjian internasional ini meliputi tiga hal, yaitu:

1. Pidanaan pelaku yang memperdagangkan anak-anak
2. Pemberian izin dan pengawasan agen-agen pekerjaan, dan

---

<sup>21</sup> Silvia Scarpa, "Child Trafficking: International Instruments to Protect the Most Vulnerable Victims", *Family Court Review*, 44, hlm. 431-433, (2006)

3. Perlindungan perempuan dan anak-anak yang bermigrasi dan beremigrasi.<sup>22</sup>

d. *Slavery Convention*, 1926

Konvensi berbicara dua hal penting yaitu perbudakan (*slavery*) dan perdagangan budak (*slave trade*). Konvensi ini mengatur langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menghapus perbudakan. Pasal 2 Konvensi Perbudakan menyatakan bahwa setiap Negara wajib untuk mencegah dan menindak perdagangan budak serta menghapus segala bentuk perbudakan.<sup>23</sup>

Konvensi tentang perbudakan mengatur tentang upaya mencegah kerja wajib atau kerja paksa yang mengarah pada kondisi perbudakan. Langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Jika kerja paksa tetap dilakukan, maka dalam hubungannya dengan kepentingan publik saja.
- 2) Jika suatu wilayah atau Negara masih menjalankan kerja paksa, Negara pihak berusaha secara progresif agar praktik tersebut dihapuskan.
- 3) Tanggung jawab atau kewajiban meniadakan atau menghapus berada dalam otoritas pemerintah yang berkompeten yang berada di wilayah tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Stephanie Farrior dalam Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, instrument internasional, dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 111

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 113

<sup>24</sup> Pasal 5 *Slavery Convention*, 1926

e. *Forced Labour Convention*, 1930

Konvensi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Buruh Internasional. Tujuan dari konvensi ini adalah menghapus atau paling tidak meminimalisasi praktik-praktik kerja paksa. Konvensi ini juga mengatur tentang larang-larangan bagi para pejabat yang berwenang untuk memperbolehkan kerja paksa untuk kepentingan orang-orang tertentu, perusahaan-perusahaan ataupun perkumpulan-perkumpulan.<sup>25</sup>

f. *International Convention for the Suppression of the Traffic in Woman of Full Age*, 1933

Fokus dari konvensi ini adalah untuk meminimalisasikan jumlah perempuan-perempuan dewasa yang menjadi korban perdagangan orang, terutama perempuan yang dipaksa untuk menjadi pelacur di rumah-rumah pelacuran.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa siapa saja yang melakukan perdagangan orang dapat dipidana, dimulai dengan pidana percobaan hingga pada saat melakukan persiapan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sementara dalam Pasal 2 diatur tentang eksistensi Negara dimana pihak dimana hukum Negara tersebut tidak mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan konvensi internasional tersebut dapat juga mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan itu.

---

<sup>25</sup> Pasal 4 *Slavery Convention*, 1926

## 2. Periode setelah tahun 1945

### a. *Convention for the suppression of the traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others*, 1949

Konvensi ini terbit akibat konvensi-konvensi sebelumnya kurang berjalan sebagaimana mestinya. Konvensi ini memiliki komitmen sebagai berikut:

- 1) Keterikatan Negara-negara pihak pada prinsip umum anti perdagangan orang
- 2) Negara-negara pihak setuju untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang spesifik
- 3) Negara-negara pihak setuju untuk menggunakan kesejahteraan masyarakat sebagai saran untuk merehabilitasi dan mendukung para korban pelacuran.<sup>26</sup>

### 4) *Abolition of Forced Labor Convention*, 1957

Konvensi ini muncul sebagai upaya untuk menghapus perbudakan dan kerja paksa secara permanen, karena kerja paksa dianggap sebagai bentuk dari perbudakan. Ruang lingkup pengaturan konvensi ini adalah mengatur ketentuan bahwa setiap Negara pihak yang meratifikasi konvensi tersebut dilarang menggunakan kerja paksa sebagai:<sup>27</sup>

- 1) Alat paksaan politik, pendidikan, pemidanaan, yang mencerminkan pandangan politik tertentu, atau secara ideology melawan bangunan sistem politik, sosial dan ekonomi.
- 2) Metode mobilisasi dan menggunakan kerja paksa untuk tujuan pembangunan ekonomi.
- 3) Alat penertiban kerja
- 4) Alat untuk memidana orang-orang yang ikut dalam aksi mogok dan

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, Op.cit. hlm. 122

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 129

5) Alat untuk diskriminasi ras, sosial dan agama.

b. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, 1979

Secara umum konvensi internasional ini untuk memberikan kerangka dasar adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dimasa lalu perempuan hanya dijadikan sebagai obyek perdagangan orang. Prinsip adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tersebut juga dimuat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa diskriminasi tidak dapat diterima dengan alasan apapun karena sejak lahir manusia memiliki hak dan kebebasan serta tidak memandang jenis kelamin.

b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000

Protokol ini dibentuk dengan alasan sebagai berikut: <sup>28</sup>

1) Tindak yang efektif untuk mencegah serta memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak mensyaratkan suatu pendekatan internasional secara komprehensif, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, menghukum pelakunya, dan melindungi korban termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka yang diakui secara internasional.

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 135

2) Instrumen internasional yang telah ada sebelumnya belum bersifat universal yang meliputi seluruh aspek perdagangan orang

3) Ketidaan instrumen internasional mengakibatkan orang-orang menjadi rentan dan menjadi korban perdagangan orang dan kurang mendapatkan perlindungan.

#### 4. Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penerapan *a quality before the law* dalam sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh perundang-undangan. Dalam pasal 184 ayat (1) <sup>29</sup> Kedudukan saksi dalam sidang perkara pidana memiliki kedudukan penting, karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan putusan Hakim. Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi akan memberikan efek dan mendapatkan perhatian yang cukup besar oleh setiap penegak hukum maupun masyarakat.

Dalam KUHAP, hak-hak terdakwa selalu berada diatas hak-hak saksi maupun korban. Hal ini menyebabkan dalam setiap “*due prosses*” seorang terdakwa akan ditempatkan dalam proses akhir untuk dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya. Akibat dari kondisi tersebut, maka korban maupun saksi akan terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian.

---

<sup>29</sup> Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

Pada dasarnya korban memiliki peran penting, karena korban dapat mengungkapkan kebenaran atas apa yang dialaminya dalam suatu tindak kejahatan baik langsung maupun tidak langsung. Korban juga merupakan peran kunci dari adanya suatu tindak pidana. Pandangan bahwa korban cukup diposisikan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana adalah tidak tepat. Hal tersebut membuat korban didiskriminalisasikan dalam hukum pidana. Sesungguhnya korban adalah pihak yang dirugikan karena terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu pemikiran bahwa orientasi hukum pidana yang semula fokus pada pelaku tindak pidana, maka kondisi tersebut harus segera dirubah dengan memperhatikan kondisi korban tindak pidana. Negara seyoganya dapat ikut bertanggungjawab karena ikut berkontribusi menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, apakah dari sisi peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum yang belum berjalan dan tidak berpihak pada korban.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan diberikannya;
2. Dapat memilih dan menentukan proses serta bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Bebas dari tekanan saat memberikan keterangan



4. Tersedianya tenaga penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjebak
6. Diberikan informasi atas perkembangan kasusnya
7. Diberikan informasi tentang putusan pengadilan
8. Diberikan informasi jika terpidana dibebaskan
9. Diberikan identitas baru
10. Disediakan tempat kediaman baru
11. Mendapatkan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapatkan nasihat hukum;
13. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga waktu perlindungan berakhir.

Restitusi adalah wujud dari resosialisasi tanggung jawab sosial yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana. Fungsi dari restitusi adalah untuk membantu korban, dan sebagai alat untuk menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban. Pemberian restitusi kepada korban merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau disebut dengan istilah reparasi.

Reparasi berasal dari bahasa Inggris *reparation*. Reparasi berkembang sebagai kata produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata *reparation* (Inggris) berasal dari bahasa latin *reparare* yang masuk melalui bahasa Prancis kuno *reparar* yang berarti suatu tindakan ganti rugi atau kompensasi. Bahasa Inggris modern, kata *reparation* memiliki etimologi agak berbeda dengan kata *reparation* di atas. Padanan lainnya ialah kata *repatriation* yang artinya merupakan suatu

tindakan mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri, terlepas tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya atau bukan. Kata *reparation* mengacu pada upaya pemulihan atau pengembalian suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum terjadinya suatu kerusakan.<sup>30</sup>

Pemberian reparasi merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada korban tanpa perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial (pengadilan). Hal ini berarti bahwa reparasi terhadap korban suatu tindak pidana berhak mendapatkan pemulihan, baik ada pelaku yang dibawa ke pengadilan maupun tidak. Bahwa seseorang dapat dianggap sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya itu berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan persaudaraan antara si korban dan pelaku.

Dalam hukum pidana Indonesia tidak ditemukan peraturan yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk menghadapi apa yang mereka lakukan dan efeknya kepada korban atau untuk mengganti kerugian pada korban atau publik. Pada kenyataannya pelaku tindak pidana hanya dijatuhkan pidana penjara, dengan dipenjaranya pelaku tindak pidana akan membatasi kebebasan pelaku. Dalam sistem hukum di Indonesia, upaya perlindungan korban kejahatan terkait dengan ganti rugi selain dalam UUD 1945 juga dapat dilihat dalam KUH Pidana, KUHAP, KUH Perdata, UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2006.

---

<sup>30</sup> Disadur dari <http://www.kontras.org/buku/bagian%2011%20priok.pdf>, (diakses pada tanggal 4 Juli 2017, pada pukul 21.55)

Pemberian restitusi diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hak restitusi untuk korban dan harus dapat dinikmati oleh setiap orang warga Negara Indonesia yang menjadi korban TPPO. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemberian restitusi kepada korban dijamin oleh hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Ketentuan-ketentuan tentang perlindungan terhadap korban harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Isi pasal tersebut menunjukkan, bahwa negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum.

UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap terjadi kejahatan, maka akan menimbulkan kerugian bagi korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian kejahatan baik materiil maupun immaterial, sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku. Hal yang harus diingat adalah bahwa penderitaan pelaku karena dipidana tidak terkait dengan penderitaan korban.

Pengaturan ganti rugi tentang korban dalam KUHAP lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap tersangka, sementara perlindungan terhadap korban

tidak dirumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Perhatian KUHAP terhadap korban tindak pidana lebih berupa proses pemberian ganti kerugian yang akan diberikan dan diterima oleh korban tindak kejahatan bisa dilakukan lebih cepat dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan ganti rugi yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.

Penggabungan perkara pidana ini agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama dilakukan pemeriksaan dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kerugian bagi orang lain yang dimaksud termasuk kerugian pihak korban. Orang lain dalam pasal ini adalah pihak korban kejahatan, yaitu perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kata “dapat” diterjemahkan sebagai penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya. Dibuka peluang bagi Hakim sebagai pengambil kebijakan untuk diajukan secara perdata atau digabungkan sehingga membuka kesempatan bagi Hakim untuk menolak penggabungan perkara yang diajukan. Apabila hal ini dilakukan maka secara hukum Hakim tidak salah karena undang-undang mengatur hal tersebut.

Pasal 98 Ayat (2) KUHAP berbunyi:

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana bertujuan agar perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 KUHAP dan seterusnya). Hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi berlaku Hukum

Acara Perdata seperti diatur dalam Pasal 101 KUHAP. Uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh pihak yang dirugikan;
- b. Terjadinya kerugian akibat dari perbuatan/tindakan si terdakwa; dan
- c. Permintaan tuntutan ganti rugi ini diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 Ayat (1) KUHAP berbunyi :

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Pasal 99 Ayat (2) berbunyi:

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Ganti kerugian yang dapat diputus hanya sebatas pada penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, tuntutan lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga harus diajukan dalam perkara biasa.

Apabila amar putusan dimuat tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika pada amar putusan berbunyi “tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa” maka pengajuan

perkara pidana bukan merupakan perkara *ne bis in idem*. Jika amar putusan hanya memuat “tidak dapat diterima” maka akan menimbulkan masalah *nebis in idem*.<sup>31</sup>

Putusan tentang ganti rugi dengan sendirinya akan mendapatkan hukum tetap. Jika putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka secara langsung karena telah digabungkan maka putusan perdata mengenai ganti kerugian mengikuti perkara pidananya. Jika pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHAP.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ayat (2), apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan terdiri atas;

- a. Ganti rugi (*damages*) yang diberikan melalui proses perdata. Tuntutan ini terpisah dari proses pidananya
- b. Kompensasi secara keperdataan yang diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Bentuk resitusi yang diberikan adalah “denda kompensasi”. Denda tersebut adalah “kewajiban yang bernilai uang” yang

---

<sup>31</sup> Laden Marpaung, *Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 85.

dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber–sumber penghasilan Negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa Negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.<sup>32</sup>

Marlinda dalam bukunya *Hak Restitusi terhadap Korban Perdagangan Manusia*, Restitusi dikaitkan dengan ganti kerugian atas penderitaan korban dengan sistem restitusi berkaitan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda, dan hak–hak korban yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Karakter restitusi lebih kepada pertanggungjawaban pelaku atas tuntutan tindakan restitusi yang bersifat pidana dalam kasus pidana.<sup>33</sup>

Sementara menurut Niniek Suparni pencabutan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian atas penderitaan korban karena adanya tindak pidana. Ganti rugi dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Dengan sendirinya Hakimlah yang harus menentukan lebih dulu siapa yang merupakan korban yang mendapatkan ganti rugi itu. Seperti apa pidana perampasan barang–barang tertentu ataupun pengumuman putusan Hakim, maka

---

<sup>32</sup> Stephen Schafer, "The victims and criminal", New York, Random house, 198, hlm.105-109, (1998)

<sup>33</sup> Marlinda, *Hak Restitusi terhadap Korban Perdagangan Manusia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 57.

kepada terpidana yang tidak membayar ganti kerugian ditetapkan oleh Hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk denda.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39.



### **BAB III**

#### **PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA**

#### **PERDAGANGAN ORANG**

Dalam pengertian luas pembedanaan diartikan sebagai suatu proses dimana Hakim menjatuhkan sanksi pidana. Dapat dikatakan bahwa sistem pembedanaan mencakup semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara kongkret hingga seseorang dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana substantif, hukum pidana formal, maupun pelaksanaan pidana itu sendiri dianggap sebagai suatu sistem dari pembedanaan.

Apabila aturan perundang-undangan dibatasi oleh hukum pidana substantif dalam KUHP, maka dapat disebut sebagai keseluruhan ketentuan yang tercantum dalam KUHP baik yang umum ataupun yang khusus tentang tindak pidana, merupakan suatu kesatuan dari sistem pembedanaan itu sendiri.

Pedoman dalam melakukan Pembedanaan menurut Pasal 55 A R-KUHP paragraph 2 adalah:

1. Penegakan hukum dan keadilan oleh Hakim saat mengadili perkara pidana
2. Hakim wajib mengutamakan keadilan meskipun terdapat konflik yang tidak dapat damaikan dalam penegakan hukum dan keadilan

Hukuman terdiri atas tiga kategori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theory*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theory*), dan teori kombinasi (*verenigings theory*).<sup>35</sup>

Teori pembalasan menyebutkan jika seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan akan dikenakan sanksi pidana. Pidana merupakan akibat yang harus ada dan merupakan pembalasan kepada seorang pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dasar pembelaan adalah keberadaan kejahatan itu sendiri. Andi Hamzah menyebutkan tentang teori pembalasan, Tujuan dari kejahatan tersebut bukan untuk tujuan praktis, seperti mengoreksi pelanggar. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur yang harus dihukum, dan ada hukuman yang mutlak karena kejahatan itu dilakukan. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat penjatuan pidana.<sup>36</sup>

Sasaran utama dari teori pembalasan adalah balas dendam, bahwa pidana adalah untuk pidana. Dalam teori pembalasan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memikirkan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku. J.E. Sahetapy menyebutkan, jika pidana tersebut diberikan dengan tujuan untuk membalas dan menakutkan maka belum tentu tujuan dari pidana tersebut akan tercapai. Terdakwa tidak secara langsung merasa bersalah atau menyesal, bahkan bisa saja ia menaruh rasa dendam.<sup>37</sup>

Dalam pemidanaan rasa keadilan bagi masyarakat tersebut menjadi asas penting yang harus dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Titik berat penilaian rasa

---

<sup>35</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1958, hlm. 157

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

<sup>37</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung: 1979, hlm. 149.

keadilan bagi masyarakat tersebut tercermin dalam sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dari isi rumusan suatu tindak pidana. Melakukan penilaian apakah dapat dicela suatu perbuatan pidana bagi pembuatnya, menilai pengaruhnya bagi korban, masyarakat, tujuan hidup bernegara serta memperkirakan pengaruh pidana yang akan dijatuhkan bagi pembuatnya sendiri sehingga dapat ditentukan putusan pidana yang tepat.

Pasal 12 RKUHP disebutkan “Dalam penerapan hukum, Hakim harus dapat menempatkan keadilan diatas kepastian hukum”. Subtansi pasal tersebut diselesaikan dengan cara menghubungkan keadilan dengan sifat melawan hukum materiel dan kesalahan dalam pengertian normatif.<sup>38</sup>

Syarat mutlak dari keadilan yang sifatnya absolut ini merupakan pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,<sup>39</sup> Kejahatan tidak pernah hanya menjadi sarana untuk mempromosikan tujuan ataupun kepentingan lain bagi pelakunya dan masyarakat. Namun, dalam semua kasus, itu harus dilaksanakan hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan. Setiap orang harus diberi penghargaan, seperti perilakunya, rasa dendam tidak boleh diserahkan kepada anggota masyarakat. Inilah mengapa teori ini disebut juga teori pembalasan.

Andi Hamzah dalam teori pembalasan menyebutkan dalam teori pembalasan bahwa hukuman tidak saja untuk mencapai tujuan praktis,

---

<sup>38</sup> Disebutkan dalam penjelasan pasal 12 RKUHP 2010 bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberikan penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian kongkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian kongkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 . hlm. 11.

contohnya menghukum penjahat. Tindak pidana mengandung unsur-unsur tentang siapa yang harus dihukum, dan hukuman mutlak diberikan karena tindak pidana tersebut dilakukan. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat dari sanksi pidana.<sup>40</sup>

Dalam ppidanaan juga dikenal teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori *utilitarian*, kedua teori merupakan reaksi atas teori absolut. Tujuan pidana berdasarkan teori relatif bukan hanya melakukan pembalasan, namun untuk menghadirkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Koeswadji menyebutkan tujuan pokok dari ppidanaan adalah:<sup>41</sup>

1. Menjaga ketertiban umum (*deputi van der Matt Spartreich Alder*);
2. Memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat tindak pidana.  
(*Hestels van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Koreksi pelaku (*the broken van der Dade*);
4. Membasmi penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Pencegahan kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa “Kejahatan tidak hanya untuk membalas atau menghadahi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan berguna tertentu.” Teori ini disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Kejahatan tidak hanya untuk membalas atau menghadahi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

<sup>41</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

berguna tertentu “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (agar tidak melakukan kejahatan).”<sup>42</sup>

Teori relative menyebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban agar masyarakat tidak mengalami gangguan. Hal ini berarti bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan bukan untuk membalas kejahatan, tetapi untuk menjaga ketertiban umum. Jeremy Bentham juga menyebutkan manusia sebagai makhluk rasional akan secara sadar memilih dan menghindari terjadinya kesulitan. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan agar pandangan tentang kesusahan akan lebih berat dibandingkan rasa senang karena adanya suatu kejahatan.<sup>43</sup>

Teori berikutnya dalam ppidanaan adalah teori gabungan. Disebutkan bahwa tujuan pidana yaitu membalas kesalahan penjahat dan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat melalui ketertiban. Teori gabungan menggunakan teori absolut dan teori relatif untuk melakukan ppidanaan, namun demikian kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Dalam teori absolut kelemahan terlihat dari penjatuhan hukum yang harus memperlihatkan bukti-bukti. Hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan. Hukuman dijatuhkan juga tidak harus dilakukan oleh negara
2. Ketidakadilan juga terjadi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana ringan dengan hukuman yang berat. Hal ini menjadi kelemahan dari teori relative. Masyarakat menjadi tidak puas dan upaya untuk menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan menjadi tidak tercapai.

---

<sup>42</sup> Muladi dan Arief, Op. cit., hlm. 16.

<sup>43</sup> E. Utrecht, Op.cit, hlm. 157.

<sup>44</sup> Koeswadji, Op.cit, hlm. 11-12

Pemidanaan adalah sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan dan mengupayakan perubahan sikap dan perilaku narapidana agar menjadi lebih baik. Sementara penjara adalah sarana bagi narapidana untuk melakukan perubahan diri menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Muladi mengembangkan tujuan pemidanaan melalui pendekatan sosiologis, ideologis serta yuridis filosofis berlandaskan asumsi bahwa tindak pidana adalah gangguan keseimbangan, keselarasan serta keserasian bagi hidup masyarakat sehingga dapat berakibat pada kerusakan masyarakat baik secara individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerusakan individual maupun sosial akibat adanya tindak pidana. Instrumen dari tujuan pemidanaan terdiri atas (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.<sup>45</sup>

Teori gabungan lahir karena adanya ketidakpuasan atas ide teori pembalasan, unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut menjadi titik tolak dari teori gabungan. Upaya keseimbangan antara unsur pembalasan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Teori gabungan merupakan campuran antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan, pemidanaan tidak saja bertujuan untuk mengulas kesalahan penjahat, tetapi juga berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, melaksanakan ketertiban, tetapi juga memberikan kepastian bahwa beratnya pidana tidak boleh melewati batas pembalasan yang adil.

---

<sup>45</sup> Muladi, Op.cit, hlm. 61

Andi Hamzah menyatakan bahwa terdapat tiga aliran yang mempengaruhi dalam teori gabungan, yaitu

- 1) Titik berat dari teori gabungan adalah adanya unsur pembalasan dan memiliki sifat berguna untuk masyarakat. Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- 2) Pertahanan dan tata tertib masyarakat juga menjadi titik berat dari teori gabungan. Pembalasan merupakan sifat pidana dan bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana memiliki fungsi untuk pencegahan umum.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>46</sup>

Jika diperhatikan teori-teori tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembedaan pada dasarnya merupakan bentuk dari pemberian sanksi atas kejahatan yang telah dilakukan. Sanksi pidana tersebut merupakan upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan. Jika diperhatikan dari teori pembalasan, maka sanksi pidana merupakan bentuk atas reaksi terjadinya suatu kejahatan. Sanksi pidana merupakan penentuan hukum dari kejahatan yang terjadi, oleh karena itu diperlukan penjatuhan sanksi pidana yang adil agar menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Tidaklah mudah menjatuhkan sanksi pidana yang adil dalam suatu perkara, keadilan bagi salah satu pihak, belum tentu dianggap adil bagi pihak lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Kriminalisasi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 297 KUHP dimana larangan perdagangan orang telah ditetapkan. Perdagangan perempuan maupun anak laki-laki yang belum dewasa, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, 22-23

Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 297 KUHP memiliki sanksi pidana ringan sehingga tidak dapat mengakomodir perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan hanya pasal tersebut yang menyatakan tentang perdagangan orang, meskipun masih belum lengkap tentang pengertian perdagangan orang sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan pegangan dalam penegakan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO menyebutkan tentang jenis tindak pidana bagi pelaku terdiri atas pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dan pidana tambahan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan, dicabutnya izin usaha, dirampasnya hasil kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, dicabutnya status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan bagi pengurus untuk mendirikan korporasi yang memiliki bidang usaha yang sama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Ancaman hukuman dalam tindak pidana perdagangan orang bersifat kumulatif, terdiri atas pidana penjara dan denda. Sementara jenis pidana lain dalam UU PTPPO adalah pidana kurungan. Pidana kurungan dikenakan untuk menggantikan pidana denda jika tidak dibayar atau pelaku tidak mampu membayar denda paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 25). Ini sesuai dengan *adagium* latin berbunyi: “*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpora* (siapa tidak mampu membayar maka ia harus melunasi dengan derita badan).”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Jan remmelink, Op.cit, hlm 478



Untuk menegakan peraturan dan norma hukum, maka sarana atau alat yang dipergunakan terletak pada penetapan sanksi bagi pelaku kejahatan. Sanksi pidana yaitu ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa agar ditaatinya suatu kaidah, ataupun undang-undang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan “tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksakan orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara, Hukum;

- a. imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum;
- b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugrah yang ditentukan dalam hukum.”<sup>48</sup>

Sementara menurut *Black’s Law Dictionary*, *sanction* is “a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse) atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.”<sup>49</sup>

Hans Kelsen memberikan definisi tentang sanksi merupakan reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Hans Kelsen berpendapat bahwa sistem norma selalu bersandar pada sanksi. Dasar dari hukum merupakan organisasi dari kekuatan, selain itu hukum bersandar pada sistem paksaan yang dibuat untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Hukum digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu dan menjalankan

---

<sup>48</sup> <http://www.kamusbahasaindonesia.org/> diakses tanggal 8 Agustus 2017

<sup>49</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.191

program dari komunitas. Suatu norma dikatakan legal jika dilekati sanksi, meskipun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma lainnya.<sup>50</sup>

Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman,) yang memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan<sup>51</sup> Sementara menurut Friedman, sanksi merupakan cara untuk menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum merupakan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh hukum. Semua peraturan hukum menyiratkan sebuah pernyataan mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi tersebut adalah sanksi-sanksi atau janji-janji atau ancaman dalam hukum pidana.<sup>52</sup>

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terdiri atas sanksi pidana, pidana denda dan pidana tambahan. Jenis pemidanaan diatur dalam KUHP maupun dalam undang-undang lain tentang perdagangan orang. Pasal-pasal dengan sanksi pidana minimal hingga maksimal, serta denda minimal sampai dengan maksimal. Secara umum tujuan dari pemberian suatu sanksi adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan serta dilakukan penanggulangan kejahatan. Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan suatu tindak pidana. Akibat hukum tersebut dapat berupa sanksi atau hukuman pidana. Pemberian sanksi dimaksudkan untuk menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Ini merupakan fungsi sanksi sebagai prevensi umum sebagai penyelesaian sengketa

---

<sup>50</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.

<sup>51</sup> <http://kbbi.web.id/sanksi>, diakses tanggal 5 April 2017, pukul 22.00

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem: Sosial Science Perspective*, terjemahan M. Khozim, cetakan IV, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 93

(penghilangan ketegangan atau konflik kemasyarakatan) dan penegasan norma.<sup>53</sup> Sedangkan fungsi pidana sebagai “prevensi khusus berkaitan dengan tindakan (*maatregel*), walaupun dalam praktiknya bahwa pengenaan tindakan sering juga menimbulkan penderitaan. Prinsip tindakan berwujud sebagai suatu perlakuan yang dijatuhkan Hakim dalam vonis disamping atau sebagai pengganti pidana.”<sup>54</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>55</sup>, fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Unsur fundamental hukum pelaksanaannya dilakukan melalui kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Ketentuan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu diperhatikan ketiga unsur fundamental hukum yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.

Tujuan pembedaan adalah “untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera, membuat penjahat tertentu menjadi tidak melakukan kejahatan yang lain.”<sup>56</sup> Muladi menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perangkat tujuan pidana terdiri atas;

- (1) pencegahan (umum dan khusus),
- (2) perlindungan masyarakat,
- (3) menjaga solidaritas masyarakat,

---

<sup>53</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.458

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.160.

<sup>56</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. 2 Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

(4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>57</sup>

Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pidana tersebut belum tentu terdapat suatu kesamaan pendapat. Namun demikian dalam kenyataannya tujuan pidana saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tujuan pidana dari beberapa abad yang lampau, walaupun perwakilan rakyat dan pemerintah sebagai badan pembuat undang-undang memiliki alasan tersendiri untuk penetapan dasar-dasar dipidananya suatu perbuatan tertentu.

Pelaksanaan sanksi hukum pidana memang tidak selalu menyelesaikan masalah, karena penjatuhan sanksi pidana pun tidak dapat memberikan pemulihan keadilan yang dilakukan karena adanya perbuatan pidana. Penetapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang tentu saja diharapkan dapat berpihak kepada korban. Peran korban dalam proses peradilan pidana sangat dibutuhkan sejak proses penyidikan. Meskipun korban seringkali kenggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya, maka perlu dilakukan edukasi bahwa dengan tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi akan membuat dirinya kehilangan hak memperoleh restitusi.

Perbuatan yang layak dijatuhi sanksi pidana jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki motif niat jahat (*mens rea*);
- 2) Jika kejahatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan ataupun berat, sanksi pidana tetap merupakan *ultimum remedium* setelah sebelumnya dijatuhi sanksi non-pidana.

---

<sup>57</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet.5, Alumni, Bandung, 2008, hlm.61

- 3) Perbuatannya masuk dalam kategori perbuatan jahat, karena tindakan itu sendiri (*evil in it tself*). Hakikatnya pelanggaran moral dan prinsip-prinsip norma dalam masyarakat (*Mala in se atau malum in se*). Seperti pembunuhan, pencurian dan penipuan.

Kebijakan legislasi terkait penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian penting karena memberikan arah dan pertimbangan tentang sanksi dalam suatu tindak pidana. Penetapan sanksi pidana merupakan usaha penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan legislasi harus diarahkan pada upaya untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.

Untuk menetapkan lamanya ancaman pidana dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu:

#### 1. Sistem absolut

Bahwa setiap tindak pidana telah ditetapkan kualitasnya masing-masing berdasarkan ancaman pidana minimum maupun maksimum. Penetapan ancaman pidana maksimum disebut sistem indefinite atau sistem maksimum.

#### 2. Sistem Relatif

Bahwa tindak pidana tidak ditetapkan kualitasnya (maksimum pidana)nya sendiri, namun kualitasnya ditentukan dengan cara penggolongan tindak pidana dalam beberapa klasifikasi dan menetapkan ancaman pidana maksimum

untuk penggolongan tindak pidana tersebut. Sistem pendekatan relative terlihat dalam model penal code yang dirancang oleh *The American Law Institute* dan *The Canadian Law Reform*.

Berdasarkan kedua sistem tersebut, konsep KUHP baru masih menggunakan sistem absolut namun dengan beberapa modifikasi.

Atas dasar sistem absolut tersebut, maka konsep tentang penentuan lamanya maksimum dan minimum penjara, khususnya pidana penjara dan denda yaitu:

- 1) Pidana penjara terdiri atas penjara seumur hidup dan untuk waktu tertentu
- 2) Pidana penjara untuk waktu tertentu minimal satu hari kecuali ditentukan lain maksimal 15 tahun atau bahkan bisa mencapai 20 tahun.
- 3) Pasal 138 D R-KUHP 2017 menyebutkan tentang pidana denda berdasarkan kategori sebagai berikut:
  - a. kategori I Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. kategori II Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. kategori III Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - d. kategori IV Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - e. kategori V Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - f. kategori VI Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pola pidana maksimum dan minimum pidana tersebut dimuat dalam aturan umum (Buku I). Sementara untuk perumusan dalam Buku II, yang memuat perumusan tidak pidana digunakan pola perumusan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara dan kualitas pidananya dinilai kurang dari satu tahun penjara, maka digolongkan sebagai tindak pidana ringan.
- 2) Ancaman tindak pidana dengan pidana penjara atau kurungan kurang dari 1 (satu) tahun namun dinilai tetap patut diancam pidana penjara, maka diancam dengan pidana penjara maksimum yaitu paling rendah 1 (satu) tahun.
- 3) Seluruh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai 7 tahun, maka dialternatifkan dengan pidana denda, dengan kualifikasi sebagai berikut:
  - a) Golongan ringan : maksimum penjara 1 sampai dengan 2 tahun, diancam dengan pidana maksimum denda kategori ke -3
  - b) Untuk golongan sedang: maksimum penjara 2 hingga 4 tahun dan kategori golongan berat, maksimum penjara 4 hingga 7 tahun dengan ancaman maksimum denda kategori 4.
- 4) Tindak pidana yang sanga serius dikenakan sanksi pidana diatas 7 tahun tidak dikenakan pidana denda, kecuali apabila dilakukan oleh korporasi, maka dijatuhi denda maksimum berdasarkan kategori 5 untuk delik yang diancam pidana penjara 7 tahun keatas sampai dengan 15 tahun. Sementara dalam kategori 6 diancam pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup.

Pola maksimum dan minimum pidana tersebut diatas, terdapat perbedaan pola berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini yaitu:

- 1) Ancaman pidana maksimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 tahun. Dalam pola KUHP, maksimum khusus pidana penjara yang paling rendah adalah 3 minggu dan yang dibawah 1 tahun bervariasi menggunakan bulan dan minggu.
- 2) Rancangan mengenai ancaman pidana minimum khusus dalam KUHP dikenal sebagai pidana minimum khusus. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarnya terjadinya disparitas pidana untuk delik-delik pidana yang berbeda kualitasnya, mengefektifkan pengaruh prevensi general bagi delik yang dianggap meresahkan masyarakat dan untuk maksimum pidana umum maupun khusus dapat diperberat. Oleh karena itu untuk pidana tertentu dapat dilakukan pemberatan pidana.

Masalah pemberatan pidana diatur dalam pasal 54, disebutkan bahwa pidana akan diperberat jika:

1. Pegawai Negeri yang melanggar kewajiban hukum yang khusus dikenakan peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, ataupun upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya tersebut.
2. Penyalahgunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan atau lambang negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk dari suatu tindak pidana.
3. Tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan menyalahgunakan keahlian ataupun profesinya.



4. Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa bersama dengan anak dibawah usia 18 tahun
5. Tindak pidana yang dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan, atau dengan cara yang kejam.
6. Tindak pidana yang dilakukan pada saat terjadi huru hara ataupun bencana alam
7. Tindak pidana yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat
8. Terjadinya pengulangan tindak pidana.
9. Tindak pidana akibat faktor-faktor lain dalam kehidupan masyarakat.

Jika diperhatikan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pola perumusan jenis dan lamanya suatu pidana harus berlandaskan pada;

1. Pencantuman jenis pidana dalam delik terdiri atas pidana penjara dan pidana denda. Sementara ancaman pidana mati untuk delik-delik tertentu berdampingan dengan delik alternatif yaitu pidana penjara seumur hidup.
2. Jenis pidana pokok yang diancam secara tunggal atau secara alternatif, merupakan pengecualian untuk hal tertentu dan dimungkinkan dirumuskan dalam pidana alternatif kumulatif.
3. Pencatuman jumlah atau lamanya pidana, terutama jumlah maksimum khusus untuk delik-delik tertentu saja. Jumlah maksimum khusus yang diancamkan adalah:
  - a. Maksimum paling rendah adalah 1 tahun dan paing tinggi 15 tahun atau seumur hidup

- b. Maksimum 20 tahun tidak digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, kecuali digunakan sebagai pemberatan untuk delik pokok.
  - c. Pidana maksimum 20 tahun diancam untuk delik pokok yang berdiri sendiri tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif daripada pidana penjara seumur hidup.
4. Pidana denda diancamkan dalam perumusan delik yang disebut dengan kategori denda seperti yang diatur dalam buku I.

Pelaku kejahatan biasanya akan menyampaikan berbagai macam alasan menolak membayar ganti kerugian atau restitusi pada korban. Mereka memilih mengganti kewajiban membayar restitusi dengan hukuman penjara. Seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dijatuhi pidana membayar restitusi bagi korbannya bertujuan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku. Namun demikian kondisi ekonomi dari terpidana perdagangan orang tentu saja berbeda-beda. Kondisi yang berbeda tersebut tentu saja membawa ketidakberuntungan bagi korban jika pelaku perdagangan orang adalah orang yang ekonominya rendah. Menjadi tidak adil bagi korban ketika pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan seseorang ataupun korporasi yang secara ekonomi mau membayar restitusi.

Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan perdagangan orang tentu harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya untuk memberikan keadilan bagi korban perdagangan orang, maka lebih

diutamakan penggunaan sanksi tindakan tata tertib dan/atau denda. Ketentuan ditetapkannya sanksi pidana dalam perundang-undangan disebut tahap kebijakan legislative (formulasi). Menurut Cherif Bassiouni ada 3 tahap kebijakan hukum pidana yaitu tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan atau yudisial) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap kebijakan formulasi adalah tahap strategis dari seluruh proses kebijakan dalam mengoperasionalkan sanksi pidana, karena pada tahap ini perumusan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan yang merupakan landasan legalitas pada tahapan berikutnya.<sup>58</sup>

Penetapan suatu jenis dan lamanya pidana merupakan suatu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu kebijakan formulasi merupakan tahap pertama dan sangat berhubungan dengan tahapan lainnya yaitu tahap kebijakan aplikasi dan tahap kebijakan eksekusi. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran pemegang kebijakan formulasi sangat penting dan strategis dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana.<sup>59</sup>

Kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda dilihat dari sisi positif pidana denda dijadikan sebagai landasan kebijakan legislatif untuk meningkatkan fungsi pidana denda merupakan sarana ppidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri maupun jenis pidana alternative, pidana penjara jangka pendek; kedua, pemahaman terhadap kelemahan/keterbatasan daya guna pidana denda, merupakan tanda sekaligus umpan balik yang dijadikan

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi, Op.cit, hlm 72.

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 79

pertimbangan untuk menyiasati strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih efektif dalam pelaksanaannya.

## BAB IV

### TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Kebijakan merupakan terminologi yang berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Kebijakan diartikan sebagai prinsip-prinsip umum untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) untuk mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan publik, permasalahan masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).<sup>60</sup>

Socrates menyatakan bahwa kebijakan adalah pengetahuan, dan pengetahuan adalah kebijakan.<sup>61</sup> Kebijakan hukum pidana disebut sebagai politik hukum pidana (*penal policy*). Sudarto menyatakan bahwa politik hukum merupakan Upaya untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>62</sup> Kebijakan Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk melaksanakan peraturan yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang ada di masyarakat untuk mencapai sesuai yang dicita-citakan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 389.

<sup>61</sup> Sam S Souryal, *Ethic in Criminal Justice (Etika Dalam Peradilan Pidana, Upaya Mencari Kebenaran)*, Sam Houston State University US, Penerbit PT. Cipta Manunggal Edisi ke 2; 2005) hlm. 5

<sup>62</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20

Marc Ancel menyebutkan bahwa *Penal Policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan agar perumusan peraturan hukum positif menjadi lebih baik. Hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan hukum pidana. *Penal policy* adalah sama dengan kebijakan atau politik hukum pidana.<sup>64</sup>

A. Mulder menyebutkan bahwa “*Strafrechtspolitiek*” adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Perlu atau tidaknya ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku untuk dirubah atau diperbaharui
- b. Upaya apa apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara melakukan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>65</sup>

A. Mulder menyebutkan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana adalah garis kebijakan dalam menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbarui. Hal ini terkait urgensi pembaharuan hukum pidana; untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, artinya terkait kepada upaya pencegahan tindak pidana; penentuan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Hal ini berarti terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana.

Marc Ancel menerangkan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri atas peraturan hukum pidana maupun sanksinya, prosedur hukum pidana serta mekanisme dari pelaksanaan pidana.

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 27.

<sup>65</sup> Ibid

Dalam arti luas kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, pidana formal dan terlaksananya hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dilakukan melalui tahapan-tahapan konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana melalui tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikasi dan tahap kebijakan eksekutif/administrasi. Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) adalah bagian dari proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Ketiga tahapan tersebut merupakan serangkaian proses dan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam kebulatan suatu sistem.<sup>66</sup>

Penegakan hukum *in abstracto* dalam tahap formulasi yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislative. Tahap aplikasi, dilakukan pada tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Kepolisian sampai pengadilan, tahap ini merupakan tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana yang dilakukan secara nyata oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini adalah tahapan kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>67</sup>

Tahapan-tahapan tersebut menjadi landasan dilakukannya kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi melalui perumusan peraturan perundang-undangan (hukum pidana) yang dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Tahap

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm.28

<sup>67</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hlm. 391.

formulasi atau kebijakan legislatif disebut merupakan tahapan strategis dari kebijakan hukum pidana, memiliki urgensi yang tinggi menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan.

Tahap berikut adalah tahap aplikasi dan eksekusi. Jika terjadi kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif merupakan tahapan awal strategis harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, dilakukan secara terpadu antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.

Tujuan dari penanggulangan kejahatan dilakukan dengan berbagai upaya dengan membuat aturan-aturan hukum. Kebijakan atau politik hukum pidana menjadi bagian dari politik kriminal, dimana politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Kebijakan atau upaya menanggulangi kejahatan adalah bagian integral upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai



kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>68</sup> Hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih aturan yang menjadi tidak jelas terutama terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Masalah utama dari kebijakan pidana melalui sarana *penal* (hukum pidana) adalah masalah tentang:

1. Perbuatan yang ditentukan sebagai suatu tindak pidana.
2. Penjatuhan sanksi yang tepat bagi si pelanggar

Kedua masalah tersebut merupakan konsepsi integral antara kebijakan kriminal melalui kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*).

G. P. Hoefnagles<sup>69</sup> menyebutkan bahwa cara untuk menanggulangi kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Upaya-upaya yang pencegahan pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”.

Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan, sementara

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.2.

<sup>69</sup> G. P. Hoefnagles dalam buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2008, hlm. 45.

jalur non penal dititikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan represif pada hakekatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Upaya membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana tidak terlepas dari tujuan dari menanggulangi kejahatan itu sendiri. Oleh karena upaya maupun kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan atau politik hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan atau politik kriminal. Kebijakan hukum pidana adalah kebijakan sosial, sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana adalah bagian integral upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat/*social welfare*, melalui perlindungan kepada masyarakat/*social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* sangat penting adalah aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan maupun penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana *penal* dan *non penal*. Berdasarkan sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai keterbatasan (bersifat

fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional, simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif (tidak menghilangkan faktor kriminogen), individualistik/*offender oriented* (berorientasi pada pelaku)/tidak *victim oriented* (tidak berorientasi pada korban), bersifat represif, dan didukung infrastruktur dengan biaya tinggi).

Berkaitan dengan upaya memberikan perhatian terhadap korban dapat dilihat pada Kongres Internasional pada kongres PBB ke-7; "*Prevention of crime of the treatment of offenders*" di Milan (Italia) tahun 1985. Anjuran agar setiap Negara anggota memberikan perhatian kepada korban tentang masalah;

- a. *Access to justice and fair treatment* (akses atas keadilan maupun perlakuan adil);
- b. Pemberian ganti rugi (*restitution*) dari pelaku kejahatan kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya bergantung pada korban. Masalah ganti rugi tersebut dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- c. Negara wajib bertanggungjawab membayar santunan jika pelaku tidak mampu, membayar santunan (*compensation*) keuangan kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d. Bantuan materiil, medis, psikologis maupun sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat.
- e. Pembaharuan perundang-undangan,
- f. Korban dari penyalahgunaan kekuasaan,

g. Korban dari pelanggaran standar internasional yang diakui secara internasional.

Dalam kongres tersebut Negara diminta untuk memberikan perhatian terhadap korban kejahatan yang dieksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan, khususnya masalah seksual (*sexual assault*) maupun tidak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

h. Korban akibat berlakunya kebijakan di bidang tenaga kerja yang mengganggu lapangan pekerjaan atau mengakibatkan terjadinya pengangguran, dapat dilihat sebagai "*abuse of power*".

KUHP maupun KUHAP tidak ditemukan terminologi tentang korban, hukum pidana formil memberikan perhatian fokus pada perlindungan hukum atas hak dan kepentingan pelaku tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP. Namun demikian pasal-pasal tersebut kurang memberikan perhatian pada perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana. Meskipun dalam KUHAP telah diatur mengenai hal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas permohonan korban (ditafsirkan dengan "kerugian bagi orang lain"), belum mampu menempatkan korban sebagai pihak yang penting untuk dilindungi dalam sistem peradilan pidana karena kerugian pada kenyataannya yang diderita oleh korban tindak pidana, tidak hanya bersifat materil melainkan ada yang non materil atau dengan kata lain penggunaan terminologi lain selain korban tindak pidana, merefleksikan pengabaian keberadaan korban tindak pidana sebagai pihak yang mengalami kerugian.

Orientasi untuk memberikan perlindungan kepada korban sebagai suatu kebijakan dalam hukum pidana merupakan suatu upaya pembaharuan atas hukum

pidana. Dalam proses pidana korban akan berurusan dengan pihak lain seperti Polisi, Jaksa, Advokat maupun terdakwa. Relevansi pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan kepentingan korban dalam suatu proses pidana dapat dilihat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang diberikan berupa terciptanya rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan, penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang berlaku.

Pembaharuan hukum pidana saat ini berupaya untuk mewujudkan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku. Pasal 43 ayat (1) UU PTPPO menyebutkan tentang perlindungan korban dengan memberikan ganti rugi dan rehabilitasi medis serta sosial serta reintegrasi yang dilakukan oleh negara terhadap korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 dilakukan pengaturan tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama menjalani/proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, restitusi tersebut harus tercantum pada amar putusan pengadilan.

## **BAB V**

### **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Penanggulangan hukum pidana dengan menggunakan hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan kontrol terhadap kejahatan. Masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentu saja butuh untuk ditangani, dicegah, maupun dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Pidana pada dasarnya merupakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam bagi pelakunya.

Hukum pidana pada dasarnya tidak hanya ditujukan pada si penjahat, namun untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat lainnya, orang-orang yang tidak jahat. Hukum pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu melakukan usaha perbaikan terhadap si terhukum.

Marc Ancel menyebutkan bahwa “setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu tentang peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk hidup bersama, namun disesuaikan dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.”<sup>70</sup> Oleh karena itu, hukum pidana berperan sangat besar dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi suatu sistem hukum.

---

<sup>70</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm.154

Upaya perlindungan kepada individu ataupun masyarakat sangat bergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. Sudarto mengemukakan bahwa bila akan menggunakan hukum pidana, sebaiknya juga dilihat dari hubungan seluruh politik kriminal, “*social defence planning*” yang menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>71</sup>

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan manusia Indonesia secara seutuhnya, dimana tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk kesejahteraan, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana dalam fungsinya menegakkan nilai-nilai sosial dasar mengacu pada ideologi Negara Pancasila. Fungsionalisasi hukum pidana tersebut merupakan upaya agar operasionalisasi dari hukum pidana dapat terwujud.

Hukum pidana berfungsi dalam proses penegakan hukum yang melibatkan faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Hukum pidana ditegakkan sebagai upaya penegakan norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa. Tidak hanya itu, penegakan hukum juga menyangkut perlindungan hak-hak tersangka sejak proses

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 157

penegakan hukum tersebut berlangsung. Selain itu penegakan hukum juga berbicara tentang upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Dalam peradaban manusia, kejahatan selalu menjadi bayang-bayang yang mengikuti setiap orang. Dalam kehidupan bermasyarakat suatu kejahatan tidak dapat dihindari, kejahatan tersebut hadir dalam kehidupan sosial yang melekat pada setiap masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perilaku menyimpang yang menjadi ancaman bagi masyarakat, ancaman terhadap norma-norma sosial dan norma-norma hukum serta dapat mengganggu ketertiban umum dan keteriban sosial. Perkembangan kejahatan saat ini dibantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi, perkembangan masyarakat bahkan perkembangan atas bentuk dan modus kejahatan. Kejahatan terus berubah dari berbagai bentuk dan aspeknya, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Hal ini tentu saja dapat menjadi ancaman bagi keamanan dunia dan menghambat kemajuan negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan dilarang oleh undang-undang.<sup>72</sup> Sementara Moedigno Moeliono menyebutkan bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak boleh diabaikan. B Simanjutak berpendapat bahwa kejahatan adalah tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak boleh dibiarkan, yang dapat mengakibatkan goncangan dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Menurut Kartono “secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan

---

<sup>72</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.24

<sup>73</sup> B. Simanjutak dan Pasaribu. I.L, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 45



masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>74</sup> KUHP memang tidak memberikan definisi secara jelas mengenai kejahatan. Namun demikian KUHP mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Beberapa pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing. Definisi “Kejahatan” menurut R. Soesilo kejahatan dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>75</sup>

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan si penderita dan juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Bentuk kejahatan yang muncul saat ini menunjukkan, bahwa kejahatan tersebut terus berkembang. Begitu pula dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Perdagangan orang telah mengancam dan melanggar integritas korban dan menghilangkan sisi kemanusiaan. Mengingat kompleksitas dari kejahatan perdagangan orang dan posisi rentan korban, maka dibutuhkan suatu kebijakan pidana dalam penanganan korban perdagangan orang.

Penanggulangi tindak pidana perdagangan orang melalui kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana tentang perdagangan orang itu sendiri. Dimulai dari proses

---

<sup>74</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 13

<sup>75</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politia, Bogor, 1985, hlm.

pembuatan peraturan hukum, proses penegakan hukum dan proses pelaksanaan pidana dilakukan. Sehubungan dengan konteks perdagangan orang tersebut, konferensi PBB tahun 1995 yang diselenggarakan di Cairo membicarakan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberantas kejahatan transnasional, terorisme dan kejahatan terhadap perempuan. Terkait dengan pemberantasan kejahatan transnasional tersebut. Tahun 2000 diselenggarakan konferensi PBB tentang *Transnational Organized Crime* (TOC) di Palermo Italia. Konferensi PBB tersebut membahas tentang perdagangan orang, khususnya wanita dan anak sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia

Pembicaraan dalam Kongres PBB tersebut adalah respon atas perkembangan kejahatan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional, bahwa kejahatan perdagangan orang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) dan jenis kejahatan lainnya yaitu *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*. (industri perdagangan obat, penyelundupan pekerja migran, perdagangan orang, perdagangan bahan-bahan nuklir, organisasi kejahatan transnasional dan terorisme, perdagangan organ tubuh, pencurian serta penyelundupan kendaraan, pencucian uang)

Jenis-jenis kejahatan tentu saja sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat internasional, jika dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat luar biasa dan dapat menembus

keseluruhan bidang, baik terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Selain itu perkembangan kejahatan dewasa ini merupakan ancaman utama bagi kekuasaan politik, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Golongan masyarakat tersebut diperangkap dengan cara-cara memperbudak masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang. Dalam tindak pidana perdagangan orang seringkali ditemukan kasus bisnis prostitusi untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Perubahan bidang ekonomi global juga turut berperan dan memberikan keuntungan bagi pejahat kelas dunia. Bisnis perdagangan orang di level dunia memanfaatkan peningkatan arus barang, uang dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan internasional terus berupaya memperluas jangkauan wilayah kerjanya. Perdagangan orang merupakan permasalahan kemanusiaan yang terjadi dalam masyarakat yang dalam upaya pemberantasannya membutuhkan cara khusus melalui pemberian sanksi berupa pidana kepada para pelakunya namun kerap kali hasilnya belum memuaskan.

Penggunaan upaya hukum untuk memberantas perdagangan orang melalui hukum pidana adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, ketertiban umum dan ketertiban sosial. Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana penanggulangan perdagangan orang saat ini merupakan bagian dari kebijakan hukum dan politik hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang. Penggunaan hukum pidana di dalam pemberantasan

kejahatan perdagangan orang ditujukan untuk kepentingan melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan orang.

Hukum pidana memuat beberapa ketentuan yang menjamin agar norma-norma (kaidah-kaidah) hukum ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Sesuai dengan tujuannya maka hukum pidana menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik lingkup nasional maupun internasional agar tercipta keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum. Hukum Pidana juga digunakan untuk merumuskan perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang dikategorikan sebagai kejahatan perdagangan orang ke dalam undang-undang dan menetapkan sanksi-sanksi sebagai sarana penghukuman atas pelanggaran yang terjadi. Atas pelanggaran yang terjadi maka, hukum pidana akan memberikan akibat hukum yang mengakibatkan penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman kepada pelaku yang melanggar keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penderitaan yang diterima oleh pelanggar hukum pidana memang tidak dapat dihindarkan, jika norma-norma yang ditetapkan tidak ingin dilanggar, maka pemberian sanksi merupakan konsekuensi karena adanya pelanggaran hukum pidana. H.L. A. Hart, pakar ilmu hukum Amerika Serikat menyebutkan bahwa: *Punishment must (a) involve pain or other consequences normally considered unpleasant; (b) be for an actual or supposed offender for his offence; (c) be for an offence against legal rules; (d) be intentionally administered by human beings*

*other than offender; (e) be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offence is committed.*<sup>76</sup>

(hukuman harus mengakibatkan a) rasa sakit yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, b) sebagai pelaku penyerangan, c) melanggar peraturan, d) sengaja dilakukan kepada orang lain sebagai pelaku, e) ditetapkan dan diberikan oleh pihak yang berwenang dan ditetapkan oleh sistem hukum terkait pelanggaran yang dilakukan)

Sementara Al Ross, pakar kriminologi menyebutkan bahwa *punishment is that social response which; (a) occurs where there is violation of legal rule; (b) is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs; (c) involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant; (d) expresses disapproval of the violator.*<sup>77</sup>

(hukuman merupakan akibat sosial yang timbul akibat dari a) adanya pelanggaran peraturan hukum, dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kewenangan, c) mengakibatkan penderitaan atau kondisi tidak menyenangkan, d) menyatakan ketidaksetujuan atas perbuatan melanggar)

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pidana mengandung unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Dikenakan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan
- (b) Dijatuhkan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kewenangan

---

<sup>76</sup> H.L. A. Hart dalam Chairuddin Ismail, *Pidana Harta Kekayaan- Suatu Alternatif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi*, Merlyn Lestari, Jakarta, 2009, hlm.45-46

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 46

(c) Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang.

Pemberian penderitaan tersebut menurut Packer memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki, atau perbuatan yang salah, dikenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar. Oleh karena itu dalam hal pidana, fokusnya adalah terhadap perbuatan salah atau perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku. Hal ini berarti, perbuatan pelaku memiliki peran besar dan merupakan syarat dalam pemberian hukuman kepada si pelaku.

Tindak pidana perdagangan orang secara langsung mengancam dan melanggar integritas korban dan meniadakan sisi kemanusiaan. Dalam ketentuan Pasal 43 UU PTPPO bahwa perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dilihat dalam bagian konsideran huruf a dan b, sebagai berikut:

- a. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah adanya keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri tindak pidana untuk menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Penegak hukum dalam menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan

karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban dikarenakan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

Dalam konsideran tersebut, yang merupakan semangat pembuat undang-undang untuk menempatkan korban agar dapat ambil bagian dalam sistem peradilan pidana. Dalam *Guide for Policy Makers* dalam rangka Implementasi Deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* bahwa *in modern criminal justice system*, korban kejahatan maupun korban penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu apa yang menjadi haknya dapat dikatakan telah dilupakan orang.

Dalam praktek penerapan hukum pidana, korban seringkali berada dalam posisi sebagai saksi korban. Seringkali para penegak hukum lupa bahwa korban merupakan para pencari keadilan atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana positif yang berlaku saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban “*in abstracto*” secara tidak langsung.<sup>78</sup> Hal tersebut disebabkan tindak pidana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum korban secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*. Hukum pidana positif diasumsikan bahwa pelaku pelanggaran dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat dari pada mengganggu kepentingan hukum korban.

Dalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas tentang konsep “korban”, namun dalam KUHAP tercantum sejumlah aturan terkait dengan pihak yang

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 5

dirugikan. Korban dirumuskan sebagai orang yang mengalami kerugian secara fisik dan mental, menderita secara emosional dan mengalami kerugian secara ekonomi akibat dari suatu pelanggaran hukum pidana.

Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”<sup>79</sup> Sementara ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985 mengartikan korban sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.”

Pengertian-pengertian korban tersebut dapat dikatakan bahwa korban tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya atau kerugian bagi keluarganya.

---

<sup>79</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 40



UU PTPPO mengakui pentingnya pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 47 UU PTTPO disebutkan bahwa saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, maka perlu mendapatkan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses perkara. Perlindungan diberikan kepada korban berupa kerahasiaan identitas kepada korban dan keluarganya sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapatkan ancaman, baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban (Pasal 44).

Perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mendapat perhatian karena hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) mengadopsi norma-norma yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* dan *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR). Korban dipandang merupakan unsur penting dari upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang.

## BAB VI

### UPAYA PAKSA, PENYITAAN DAN EKSEKUSI DALAM PEMIDANAAN

Lilik Mulyadi,<sup>80</sup> menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiel, untuk mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiel yang sesungguhnya. Hukum acara pidana merupakan peraturan hukum tentang tata cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim serta mengatur tahap pelaksanaan dari pada putusan yang dijatuhkan.

Dalam Hukum Acara Pidana, pengaturan tentang upaya paksa diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Upaya yang diatur dalam UU tersebut adalah tentang Penahanan yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sementara dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci tentang upaya paksa, namun berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa upaya paksa diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan seseorang. Dalam KUHAP disebutkan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang merupakan rangkaian tindakan upaya paksa.

Upaya paksa merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal

---

<sup>80</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.4-6

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.<sup>81</sup>

Tindakan upaya paksa dilakukan oleh instansi penegak hukum, maka penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan harus dilaksanakan secara yuridis formil, dilakukan secara tertulis sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut tidak diperkenankan secara lisan, jika dilakukan maka upaya paksa tersebut batal demi hukum.

Hal yang harus menjadi perhatian bahwa upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana dilakukan dalam kondisi keadaan terpaksa, karena dikhawatirkan jika tersangka kabur, menghilangkan barang bukti, tidak korporatif dan lain lain. Berikut penjelasan tentang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik :

#### 1. Penangkapan

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik begitu luas, diantaranya kewenangan bagi penyidik dalam membatasi kebebasan maupun hak asasi seseorang, namun hal tersebut sesuai pada landasan hukum. Kewenangan pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang dilandaskan dengan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang dan tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.

---

<sup>81</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 77.

Pasal 1 ayat (20) KUHP dijelaskan, bahwa” penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut penangkapan tidak lain hanyalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan harus dilakukan menurut ketentuan UU.

Tentang batas waktu penangkapan tercantum dalam Pasal 19 (1) ditentukan bahwa penangkapan tidak boleh lebih dari “satu hari”, apabila lebih dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Mengenai pembatasan waktu yang singkat ini, dapat menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam prakteknya, disebabkan faktor geografi serta komunikasi. Agar penangkapan mempunyai arti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, tapi sekaligus tidak melanggar hukum, dapat disetujui alternatif yang tercantum dalam buku pedoman pelaksana KUHAP yang memberi jalan keluar atas hambatan tersebut:

- a. Penangkapan dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat terdekat;
- b. Jika penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

Alasan dilakukan penangkapan dapat ditemukan pada pasal 17 KUHAP “ perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Bukti yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Perintah penangkapan dalam pasal ini menunjukkan bahwa penangkapan tidak dapat secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul melakukan tindak pidana.<sup>82</sup>

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penangkapan, berdasarkan Pasal 19 (2), tidak dibolehkan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum melarang dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran. Tentu terhadap prinsip hukum ini ada pengecualian, yaitu apabila telah dilakukan dua kali pemanggilan berturut-turut secara resmi namun tidak dipenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas. Jika terjadi seperti itu, tersangka dapat ditangkap atau dibawa ke kantor polisi dengan paksa untuk melakukan pemeriksaan.<sup>83</sup>

## 2. Penahanan

Pasal 1 (21) Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya sesuai tata cara yang diatur dalam UU ini. Tujuan Penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menyatakan penahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan Penahanan. Penuntut umum melakukan penahanan bertujuan

---

<sup>82</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 cet ke-8, hlm. 358-359

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penjelasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, cet ke-9, edisi ke 2, hlm. 161

untuk kepentingan penuntutan dan penahanan yang dilakukan oleh peradilan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

a. Dasar Penahanan

- 1) Landasan dasar, yaitu Pasal 282 (3), 296, 335 (1), 353 (1), 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, dan 506 KUHP, dan pasal-pasal lain dari ketentuan pidana khusus;
- 2) Landasan unsur kekhawatiran, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana
- 3) Terpenuhinya syarat Pasal 21 (1), yaitu tersangka/ terdakwa diduga keras adalah pelaku tindak pidana yang bersangkutan didasarkan pada bukti yang cukup.

b. Tata cara Penahanan

- 1). Dikeluarkan surat perintah penahanan atau surat penetapan

Untuk penyidik dan penuntut umum melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan, sementara jika melakukan penahanan adalah Hakim, maka perintah penahanan berbentuk surat penetapan. Surat tersebut harus memuat hal: identitas tersangka/ terdakwa, menyebut alasan penahanan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan.

- 2) Tembusan harus diberikan kepada keluarga

Tembusan surat perintah penahanan maupun penetapan penahanan wajib diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa.

- 3) Jenis tahanan

(a) Penahanan rumah tahanan Negara (RUTAN)

(b) Tahanan rumah

(c) Penahanan kota

#### 4) Batas waktu Penahanan

##### a. Pembatasan penahanan

1) Batas kewenangan penyidik adalah 20 hari, jika diperlukan untuk penyidikan ditambah paling lama 40 hari=60 hari. (Pasal 24)

2) Batas kewenangan penuntut umum adalah 20, boleh meminta diperpanjang kepada Ketua Pengadilan Negeri, jika diizinkan paling lama 30 hari = 50 hari. (pasal 25)

3) Batas kewenangan Hakim:

a) Kewenangan Hakim pengadilan negeri adalah 30 hari, jika diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan diperpanjang paling lama 60 hari=90 hari (pasal 26)

b) Hakim pengadilan tinggi sama dengan kewenangan Hakim pengadilan negeri (pasal 27)

c) Kewenangan Hakim Agung adalah 50 hari dan jika diperlukan lagi diperpanjang paling lama 60 hari= 110 hari (pasal 28)

##### c. Pengecualian pembatasan Penahanan

Batas jangka waktu penahanan, terdapat pasal pengecualian yang diatur dalam Pasal 29. Untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena:

- 1) Tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat dan dibuktikan melalui keterangan dokter;
  - 2) Perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- d. Hak tahanan selama berada dalam tahanan
- 1) Hak yang bersifat umum
    - a) Berhak mendapat pemeriksaan yang segera dari penyidik (pasal 50);
    - b) Berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum (pasal 57 (1))
    - c) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan (pasal 58);
    - d) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga (pasal 60)
  - 2) Hak atas perawatan kesehatan (bab II PERMEN Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983)
  - 3) Hak atas perawatan rohani (pasal 13 dan 14 PERMEN Kehakiman no. M.04.UM.01.06/1983)
    - a. Fasilitas sarana pendidikan
    - b. Fasilitas keagamaan
    - c. Fasilitas sarana olahraga dan kesenian
  - 4) Larangan wajib kerja (pasal 15 PERMEN Kehakiman no. M.04.UM.01.06/1983)
  - 5) Hak mendapat kunjungan (bab III PERMEN Kehakiman no. M.04.UM.01.06/1983)



### 3. Pengeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan pengeledahan rumah, pengeledahan pakaian, pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 32 KUHAP. Antara penahanan dan pengeledahan terdapat perbedaan, jika dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan, maka pada pengeledahan lain halnya, tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan pengeledahan. Wewenang pengeledahan hanya diberikan kepada instansi “penyidik”. Jadi hanya ada pada tangan penyidik, baik dia penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penuntut umum tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah dalam tindak pidana umum. Demikian pula Hakim pada semua tingkat peradilan tidak memiliki kewenangan tersebut, terkecuali dalam tindak pidana khusus, misalnya korupsi, subversi, tindak pidana ekonomi. Kewenangan pengeledahan tersebut diberikan kepada penuntut umum. Pengeledahan dilakukan oleh penyidik dan harus mendapatkan surat izin Ketua pengadilan negeri setempat.

Pengeledahan wajib disaksikan oleh dua orang saksi dan mendapat persetujuan dari tersangka atau penghuninya. Dalam hal tersangka atau penghuni menolak diadakannya pengeledahan maka dua orang saksi tersebut ditambah dengan kesaksian kepala desa atau ketua lingkungan. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2), jika yang melakukan pengeledahan rumah itu bukan penyidik, maka petugas Kepolisian lainnya harus menunjukkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah tertulis penyidik. Ketentuan surat izin ini sedikit banyak

akan menjadi hambatan bagi tugas-tugas penyelidikan, mengingat sulitnya dan jauhnya hubungan satu wilayah dengan tempat kedudukan pengadilan negeri, khususnya bagi sektor Kepolisian yang jauh di pedalaman. Kemungkinan yang terjadi adalah hilangnya jejak dan bukti-bukti, sebelum izin penggeledahan ada ditangan penyidik. Contoh, penyidik pembantu pada suatu daerah terpencil mengetahui dengan pasti bahwa tersangka berada dalam rumah kediamannya. Sementara ia harus meminta izin dulu yang harus ditempuh dengan jalan kaki selama dua atau tiga hari. Jalan keluar yang dapat dilakukan adalah permintaan secara lisan melalui telepon, radiogram, dan lain-lain. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka digunakan ketentuan Pasal 34 KUHAP bahwa penggeledahan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pasal 33 ayat (5) menyebutkan bahwa penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik di lokasi: (a) halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; (b) tempat lain tersangka bertempat tinggal atau belum ada; (c) di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; (d) di tempat penginapan maupun tempat umum lainnya (Pasal 14 ayat 1 KUHAP).

Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa :”keadaan sangat perlu dan mendesak” adalah jika ditempat yang akan digeledah diduga terdapat tersangka atau terdakwa yang dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang akan disita dikhawatirkan dimusnahkan atau dipindah tangankan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa ukuran keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut dapat berbeda antara penyidik dengan Ketua

Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, ada kemungkinan Ketua Pengadilan Negeri tidak menyetujui penggeledahan tersebut. Hal ini dimungkinkan agar Ketua Pengadilan Negeri tidak hanya sekedar stempel dan kemudian menyetujui, melainkan juga mengawasi apakah penggeledahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: (a) ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Perwakilan Rakyat Daerah; (b) tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; (c) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (Pasal 35 KUHAP).

#### 4. Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Kepentingan dilakukannya penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti, karena suatu perkara tidak dapat diajukan kemuka sidang pengadilan tanpa dilengkapi dengan barang bukti. Penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyelidikan, dalam tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Terkadang barang yang disita tersebut bukan milik tersangka, karena kepemilikan barang tersebut dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan, seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi maupun penyelundupan.

Mengenai benda yang dapat disita diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Setelah semua proses ditingkat penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan penyidik,

tersangka, dan barang bukti ke pihak kejaksaan (penuntut umum). Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 8 KUHAP ayat (1) penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ayat (3), penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan:

1. Tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara;
2. Jika penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 1 (16), penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik, sesuai ketentuan dalam Pasal 38, karena penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan di taraf penyidikan. Setelah melalui taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan dan atas nama penyidik.

1. Bentuk dan tata cara penyitaan
  - a. Penyitaan biasa dan tata caranya
    - 1) Ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri (pasal 38 [1])
    - 2) Menunjukkan tanda pengenalan (pasal 128)
    - 3) Memperlihatkan benda yang akan disita (pasal 129)

- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (pasal 129 [1])
- 5) Membuat berita acara penyitaan (pasal 129 [2])
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya dan kepada keluarga pihak dimana barang itu disita serta kepada kepala desa. (pasal 129 [4])
- 7) Membungkus benda sitaan (pasal 130 [1]), jika barang sitaan tidak memungkinkan untuk dibungkus, maka harus dibuat catatan atau data tentang barang sitaan, kemudian catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan dan dikaikan pada barang sitaan. (pasal 130 [2])

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Pasal 38 [2] memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan oleh pasal 38 [1]. Hal ini dilakukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sementara untuk tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah:

- 1) Tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri
- 2) Hanya terbatas atas benda yang bergerak saja
- 3) Wajib segera melaporkan guna mendapat persetujuan.

2. Benda yang dapat disita

Benda yang dapat disita adalah benda yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana. Jika benda yang disita tidak ada kaitannya dengan peristiwa tindak

pidana yang sedang diperiksa, dianggap merupakan penyitaan yang bertentangan dengan hukum. (Pasal 39).

### 3. Penyimpanan barang sitaan

Ketentuan Pasal 44 menyebutkan bahwa, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Berada dibawah lingkungan Kementerian Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan barang sitaan dari seluruh instansi.

### 4. Penjualan lelang barang sitaan

Penjualan lelang disini tidak sama dengan penjualan lelang ditaraf eksekusi yang dilakukan dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, namun hal ini apabila pejabat bersangkutan dihadapkan pada suatu keadaan yang *extra ordinary*, maka dalam ruang lingkup ini Pasal 45 memberi kemungkinan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menjual benda sitaan, namun dengan syarat:

- 1) Apabila benda sitaan terdiri dari benda yang mudah rusak atau busuk;
- 2) Apabila benda sitaan tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 3) Jika biaya penyimpanan benda menjadi terlalu tinggi.
- 4) Hasil dari penjualan lelang benda tersebut kembali disimpan di Rupbasan.

## 5. Pengembalian barang sitaan

Untuk benda yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkan, pada prinsipnya benda sitaan maka harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada siapa yang paling berhak. Berdasarkan Pasal 46, pengembalian benda sitaan harus dikembalikan sesegera mungkin kepada yang paling berhak:

- 1) Jika objektif pemeriksaan penyidikan tidak memerlukan lagi;
- 2) Jika perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- 3) Perkara tersebut dikesampingkan/dideponer untuk kepentingan umum;
- 4) Ditutupnya perkara tersebut demi hukum, karena alasan *nebis in idem* atau tersangka/terdakwa meninggal dunia atau karena tuntutan terhadap terhadap tindak pidana sudah kadaluarsa.

### 1. Tertangkap Tangan

Dalam hal tersangka tertangkap tangan, sesuai Pasal 1 angka 19 (“KUHP”): “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan tentang keistimewaan penangkapan tertangkap tangan yang menyatakan bahwa, “dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.”

Dalam ayat 3 “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” Pengeledahan keistimewaan tertangkap tangan dapat ditemukan dalam Pasal 35, namun dalam Pasal 34 diuraikan bahwa dalam keadaan mendesak jika penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan pengeledahan:

1. Di halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada di atasnya
2. Di setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada
3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya
4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Pasal 35 mengatakan “kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan atau Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.”

Pasal 40 menyebutkan tentang penyitaan keistimewaan tertangkap tangan yaitu “dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata



atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” serta dalam Pasal 41 “dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari apadnya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerima”

#### 6. Eksekusi

Eksekusi bukanlah tindakan main Hakim sendiri, melainkan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai:

1. Pelaksanaan putusan Hakim, pelaksanaan hukuman badan peradilan khususnya hukuman mati
2. Penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan<sup>84</sup>

Ketentuan Pasal 270 KUHAP menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan pengadilan pada prinsipnya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak ada upaya hukum lagi yang terbuka bagi terpidana.

---

<sup>84</sup> <http://www.kbbi.web.id/eksekusi>, (diakses tanggal 1 Pebruari 2018, pukul 21.30)

Dalam hukum acara perdata, Pasal 180 ayat (1) HIR menentukan bahwa biarpun orang membantah putusan Hakim pengadilan negeri, maka dapat diperintahkan agar putusan Hakim tersebut dijalankan lebih dahulu. Jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal tersebut dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan Hakim yang tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan lebih dahulu.

Menurut Rutgers dalam R. Tresna<sup>85</sup> menyebutkan bahwa keputusan-keputusan Pengadilan Negeri dapat segera dilaksanakan, karena dalam HIR tidak terdapat aturan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa apel (banding) menghalangi dijalankannya keputusan Hakim, sebagaimana tercantum dalam pasal 54 *Reglement* acara perdata di muka pengadilan *Raad Justisi* dan *Hooggerechtshof*.

Eksekusi dijalankan berdasarkan beberapa asas yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Eksekusi dilaksanakan terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan yang mempunyai keputusan hukum tetap. Namun dalam undang-undang juga diatur beberapa pengecualian, sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) yaitu eksekusi dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.

---

<sup>85</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.159

- b. Pelaksanaan putusan provisi, yaitu jika tuntutan provisi dikabulkan oleh Hakim maka putusan provisi dijalankan meskipun perkara pokok belum diputus.
  - c. Pembuatan akta perdamaian di persidangan memiliki kekuatan eksekusi seperti putusan dengan kekuatan hukum yang tetap.
2. Eksekusi dilaksanakan terhadap putusan yang tidak mau dijalankan secara sukarela. Eksekusi adalah tindakan paksa yang dilaksanakan oleh pengadilan, jika pihak yang kalah mau menjalankan sendiri putusan pengadilan maka tindakan eksekusi dikesampingkan.
3. Putusan eksekusi adalah putusan yang bersifat *comdemnatoir*.
- Bahwa putusan eksekusi tersebut mengandung *dictum* yang bersifat penghukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Farrior, Stephanie dalam Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, instrument internasional, dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Friedman, Lawrence M. *The Legal Sistem: Sosial Science Perspective*, terjemahan M. Khozim, cetakan IV, Nusa Media, Bandung, 2011
- Hamzah, Andi *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penjelasan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, cet ke-9, edisi ke 2
- Hart, H.L. A. dalam Chairuddin Ismail, *Pidana Harta Kekayaan- Suatu Alternatif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi*, Merlyn Lestari, Jakarta, 2009
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 cet ke-8
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995 Mulyadi, Lilik *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, *Hukum Pentensier Indonesia*, ed. 2 Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005,
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek*, Bandung, PT. Alumni, 2008
- , *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet.5, Alumni, Bandung, 2008
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sahetapy, J.E, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung: 1979
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Samsul, Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Satochid, Kartanegara *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2006
- Simanjuntak, Nikolas *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Souryal, Sam S, *Ethic in Criminal Justice (Etika Dalam Peradilan Pidana, Upaya Mencari Kebenaran)*, Sam Houston State University US, Penerbit PT. Cipta Manunggal Edisi ke 2; 2005)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1958

### **Jurnal**

Rosnawati, Mohd. Din, dan Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 4, No 1 Februari 2016,

Silvia Scarpa, "Child Trafficking: International Instruments to Protect the Most Vulnerable Victims", *Family Court Review*, 44, hlm. 431-433, (2006)

### **Artikel internet**

<http://www.kbbi.web.id/eksekusi>, (diakses tanggal 1 Pebruari 2018, pukul 21.30)

## **RIWAYAT HIDUP**

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan merupakan Dosen Tetap dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lulus dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya pada tahun 2019, saat ini masih aktif sebagai anggota Asosiasi Peminat dan Pemerhati Hukum Gender Indonesia (APPHGI). Selain itu aktif juga menulis buku, penulisan di jurnal dan aktif sebagai pembicara di konferensi nasional dan internasional.

# Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[moam.info](http://moam.info)

Internet Source

1 %

2

[edoc.pub](http://edoc.pub)

Internet Source

1 %

3

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

1 %

4

[Repository.umy.ac.id](http://Repository.umy.ac.id)

Internet Source

1 %

5

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Internet Source

1 %

6

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

1 %

7

[repository.radenfatah.ac.id](http://repository.radenfatah.ac.id)

Internet Source

1 %

8

[vjkeybot.wordpress.com](http://vjkeybot.wordpress.com)

Internet Source

1 %

9

[fr1y3r1.wordpress.com](http://fr1y3r1.wordpress.com)

Internet Source

1 %



10	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://reformasikuhp.org">reformasikuhp.org</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://semutuyet.blogspot.com">semutuyet.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://ejurnal.untag-smd.ac.id">ejurnal.untag-smd.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://hukumpidanafhunlam.blogspot.com">hukumpidanafhunlam.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://bramfikma.blogspot.com">bramfikma.blogspot.com</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1 %

Exclude bibliography      On